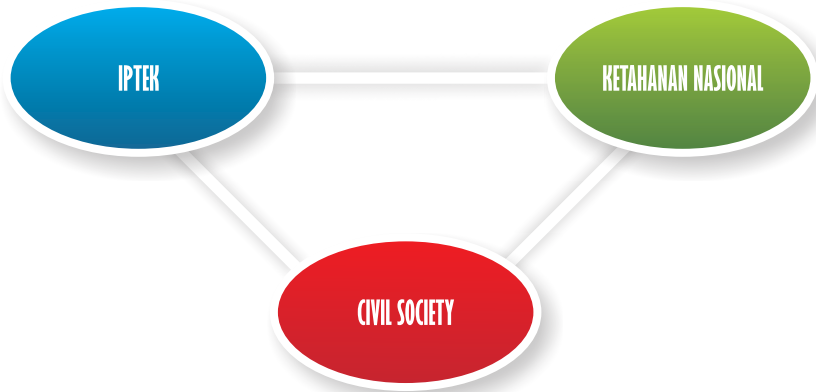


"Konsep
Meningkatkan
Daya Saing
Bangsa"

PENINGKATAN CIVIL SOCIETY

UNTUK KEMAJUAN IPTEK DAN KETAHANAN NASIONAL



PENINGKATAN CIVIL SOCIETY

UNTUK KEMAJUAN IPTEK DAN KETAHANAN NASIONAL

Dr. Ir. Dwi Sulisworo

**Kutipan Pasal 72:
Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta
(UU No. 19 Tahun 2002)**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Ir. Dwi Sulisworo

PENINGKATAN CIVIL SOCIETY

UNTUK KEMAJUAN IPTEK DAN KETAHANAN NASIONAL



Cetta Media

PENINGKATAN CIVIL SOCIETY

UNTUK KEMAJUAN IPTEK DAN KETAHANAN NASIONAL

© 2013 Dr. Ir. Dwi Sulisworo.

Hak cipta yang dilindungi undang-undang ada pada Penulis.

Hak penerbitan ada pada Penerbit Cetta Media Yogyakarta.

Penulis

Dr. Ir. Dwi Sulisworo

Desain Sampul

Tim Redaksi

Layouter

Tim Redaksi

Editor

Tim Redaksi

Cetakan I, Mei 2013

Diterbitkan oleh:

Penerbit Cetta Media

(KELOMPOK PENERBIT MARKUMI)

Minggiran MJ II/ 1323 RT.64/17 Yogyakarta

Telp./Fax. (0274) 6874768/ 413860

Website: www.markumi.com

Email: penerbitmarkumi@yahoo.com

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penerbit Cetta Media, Redaksi Peningkatan Civil Society (untuk Kemajuan Iptek dan Ketahanan Nasional)/

Redaksi Penerbit Cetta Media Yogyakarta – Yogyakarta 2013.

181 hlm., 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-602-97513-4-5

1. Sosial - Teknologi

I. Judul

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Dengan terlebih dulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, serta atas segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas menyusun buku ini.

Penulis menyadari bahwa dihadapkan dengan kemampuan intelektual serta penguasaan di bidang akademis, kualitas dari tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya kritikan atau masukan guna perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar buku ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada negeri ini, termasuk bagi siapa saja yang barangkali membutuhkannya dalam rangka membahas aktualisasi nilai-nilai kepemimpinan dan peran pemimpin bangsa kita ini dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa, senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, Januari 2013

Penulis

Dr. Ir. Dwi Sulisworo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR | v

DAFTAR ISI | vii

DAFTAR TABEL | ix

DAFTAR GAMBAR | x

BAB I | 1

PENDAHULUAN | 1

1. Umum | 1
2. Maksud dan Tujuan | 6
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut | 8
4. Metoda dan Pendekatan | 11
5. Pengertian-pengertian | 12

BAB II | 16

LANDASAN PEMIKIRAN | 16

1. Umum | 16
2. Paradigma Nasional | 16
3. Peraturan dan Perundangan Terkait | 25
4. Latar Belakang Teori | 29
5. Tinjauan Kepustakaan | 49

BAB III | 54

KONDISI PENINGKATAN CIVIL SOCIETY SAAT INI | 54

1. Umum | 54
2. Kondisi Peningkatan Civil Society Saat Ini | 54
3. Implikasi Peningkatan Civil Society guna Pemajuan IPTEK dalam rangka Ketahanan Nasional | 75
4. Permasalahan yang dihadapi | 80

BAB IV | 88

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS | 88

1. Umum | 88
2. Perkembangan Internasional/ Global | 88
3. Perkembangan Regional | 94
4. Perkembangan Nasional | 97
5. Peluang dan Kendala Lingkungan Strategi | 103

BAB V | 107

**KONDISI PENINGKATAN CIVIL SOCIETY YANG
DIHARAPKAN | 107**

1. Umum | 107
2. Kondisi Ideal Peningkatan Civil Society | 107
3. Kontribusi Peningkatan Civil Society guna Pemajuan IPTEK dalam rangka Ketahanan Nasional | 120
4. Indikator Keberhasilan | 123

BAB VI | 132

**KONSEPSI PEMECAHAN MASALAH PENINGKATAN
CIVIL SOCIETY | 132**

1. Umum | 132
2. Kebijakan | 137
3. Strategi | 139
4. Upaya | 141

BAB VII | 158

DAFTAR PUSTAKA | 159

GLOSSARY | 166

INDEKS | 169

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Korelasi Sifat Ketahanan Nasional dan Prinsip Civil Society | 40
- Tabel 2 Perbandingan Paradigma Pancasila dan Paradigma Dunia | 42
- Tabel 3 Korelasi Prasyarat Masyarakat Madani dan Asas Ketahanan Nasional | 45
- Tabel 4 Perbandingan Paradigma Pancasila dan Paradigma Dunia | 47
- Tabel 5 Tingkat Implementasi Civil Society di Beberapa Negara | 57
- Tabel 6 E-government Development in South-Eastern Asia | 60
- Tabel 7 Skor Variabel CS Indonesia dalam HDI | 66
- Tabel 8 Jenis-jenis Problem Kemasyarakatan di Indonesia Tahun 2009 | 69
- Tabel 9 Posisi Indonesia di Dunia pada Aspek CS | 72
- Tabel 10 Affinity Diagram untuk Penentuan Akat Masalah dalam Peningkatan Civil Society | 80
- Tabel 11 Jumlah dan Proporsi Penduduk Perkotaan Indonesia per Tiap Jenis Kota Tahun 1980, 2000, 2010 dan 2015 (dalam juta jiwa) | 83

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Tingkat Pemanfaatan IT untuk e-gov di Beberapa Region | 59
- Gambar 2 Modus Teknologi Akses Informasi | 61
- Gambar 3 Stakeholder CSO | 65
- Gambar 4 Tingkat Layanan Keadilan Hukum atau Penegakan Hukum | 68
- Gambar 5 Faktor Pengaruh pada Pemajuan IPTEK untuk Daya Saing | 74
- Gambar 6 Siklus Hubungan Peran CS-IPTEK-TANNAS | 79

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat dalam konsteks asas ketahanan nasional, implementasi wawasan nusantara menjadi sangat penting. Pada hakekatnya wawasan nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia tentang ciri dan lingkungan keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Prinsip Wawasan Nusantara tentunya menjadi tumpuan berpikir, berkehendak, dalam bertindak dalam penyelenggaraan kehidupan nasional menurut konsep dasar Wawasan Nasional bangsa Indonesia, yaitu Wawasan Nusantara yang tidak lain dari batu bangun wawasan nasional bangsa Indonesia. Konsep tersebut terdiri konsep Bhinneka Tunggal Ika, Persatuan Kesatuan, Kebangsaan, Tanah Air, Negara Kebangsaan, Negara Kepulauan.¹

Pembahasan tentang masyarakat madani sesungguhnya menjadi bagian penting dalam penerapan konsepsi wawasan nusantara. Dalam proses sosialisasi konsepsi wawasan nusantara

¹ Lemhannas, *Geopolitik dan Wawasan Nusantara*, Jakarta, 2010.

akan mencakup pembahasan tentang 5 hal: (1) Kesadaran, Paham, dan Semangat Kebangsaan, (2) Cinta dan Pembelaan Tanah Air, (3) Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Warga Negara, (4) Kehidupan Multikultural dan Plural, dan (5) Masyarakat Madani (Civil Society). Sehingga pembahasan tentang penguatan *civil society* akan mendukung penerapan konsepsi wawasan nusantara dengan lebih baik.

Dalam wawasan nusantara, kehidupan bernegara akan terjamin dalam mencapai tujuan bersama bila ada kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan. Keberadaan masyarakat madani atau *civil society* diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang kekuatan negara dalam hal ini pemerintah. Masyarakat madani yang bermoral, sadar hukum, dan beradab; mampu mewakili masyarakat umum atau rakyat dalam memperjuangkan kepentingan bersama kepada pemerintahan². Di samping itu, masyarakat madani akan mampu mendorong pemerintahan untuk pengembangan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat umum. Sebaliknya, masyarakat madani akan mendukung pemerintahan yang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Dengan demikian, akan dapat ditegakkan sistem kekuasaan yang berorientasi pada

²“...responsible competitiveness depends on deepening the partnership between innovative business action, civil society enablers and ambitious government policy”. Lihat di AccountAbility, *RESPONSIBLE COMPETITIVENESS IN CHINA 2009: Seizing the low carbon opportunity for green development*, 2010

kepentingan rakyat banyak sehingga kehidupan bersama yang harmonis dan dinamis dapat diciptakan.³

Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang cocok dengan sejarah panjang bangsa ini dan juga kondisi terkini masyarakat. Pada dasarnya masyarakat madani yang diinginkan adalah masyarakat sipil yang demokrasi dan religius⁴. Usaha-usaha pembentukan masyarakat madani di Indonesia perlu mendorong dikembangkannya warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius, kritis argumentatif, kreatif, berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi mass media secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesional, berani dan mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau silih asah-asih-asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, dan mengenal cita-cita Indonesia di masa mendatang.

Beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi dalam peningkatan masyarakat madani antara lain adalah

³ Lemhannas, Modul III Wawasan Nusantara: *Implementasi Konsepsi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Nasional*, 2010

⁴ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2001

1. Kepercayaan yang menjadi pengikat antar anggota masyarakat yang bekerja sama membangun sebuah masyarakat unggul relatif belum terbangun dengan baik. Beberapa konflik komunal dan sosial merupakan indikasi adanya belum cukup kuatnya saling percaya di dalam masyarakat kita.
2. Belum berjalannya sistem demokrasi yang baik dengan ditandai masih adanya penindasan yang dilakukan di dalam masyarakat (penindasan para penguasa pada rakyatnya, penindasan oleh pemilik modal pada mereka yang tidak bermodal, penindasan oleh mereka yang mempunyai pengetahuan pada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan), rasa takut akan teror yang ditebarkan oleh pihak lain pada anggota masyarakat yang dianggap berbeda pandangan politik, kepercayaan, ras dan agama.
3. Tingkat transparansi yang masih kurang yang ditandai dengan misalnya laporan kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran pemerintah daerah, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang ada, dan lainnya.

Dalam hal pengembangan IPTEK, dari indek daya saing IPTEK yang masih rendah, proporsi anggaran pengembangan IPTEK, kontribusi IPTEK pada pendapatan nasional, persentase produk komoditas ekspor yang tinggi di bahan mentah menunjukkan bahwa IPTEK masih belum menjadi titik unkit

daya saing bangsa. Hal ini menjadi penting untuk diberi pekanan dalam usaha pencapaian tujuan nasional. Beberapa kebijakan pengembangan IPTEK yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi masih perlu diperhatikan ketika akan diintegrasikan dengan berbagai kebijakan dari kementerian lain termasuk sebagai bagian atau *tools* untuk meningkatkan masyarakat madani yang unggul.

Ketahanan nasional Indonesia sesungguhnya masih mengalami berbagai tantangan dan masalah. Tingkat kesejahteraan (baik ekonomi, pendidikan, dan kesehatan) yang masih belum merata antar daerah, ketersediaan sumber daya (alam, teknologi, manusia, finansial) yang tidak sama di tiap daerah merupakan beberapa permasalahan nasional yang perlu diperhatikan untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pemanfaatan, pengembangan, dan pemajuan IPTEK pada dasarnya merupakan salah satu strategi besar bangsa Indonesia untuk mencapai ketahanan nasional yang kokoh. Sebagaimana diketahui ketahanan nasional memiliki asas: kesejahteraan dan keamanan, komprehensif/ menyeluruh terpadu, dan kekeluargaan. Dengan demikian, dalam pengembangan IPTEK pada lingkungan masyarakat madani perlu memperhatikan asas-asas tersebut. Asas ini bukanlah satu hal yang saling terpisah, namun merupakan hal yang menyatu

dan saling berkelindan. Dengan tumbuhnya *civil society* maka diharapkan akan ada kejelasan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan secara terpadu dengan semangat kekeluargaan melalui IPTEK yang sesuai bagi Indonesia.

Kunci untuk tercapainya hal tersebut adalah pada penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing dalam menghadapi isu-isu globalisasi. Sumber daya manusia ini mencakup sumber daya yang ada di berbagai elemen masyarakat madani yaitu di pemerintahan, dunia bisnis, dan organisasi kemasyarakatan.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan dan situasi saat ini sebagai mana diulas sebelumnya, dapat diambil sebuah permasalahan, yaitu: **Bagaimana meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka masyarakat madani guna pemajuan IPTEK dalam rangka ketahanan nasional.**

2. Maksud dan Tujuan

Dalam penyelesaian masalah, beberapa *best practice* dari penelitian pengembangan maupun penelitian kebijakan yang pernah dilakukan akan dicoba dilakukan analisis untuk kasus di Indonesia. Penelitian yang dilakukan di Gambia menunjukkan pentingnya peran *civil society* dalam pencapaian MDGs, hanya

saja belum ditunjukkan peran dunia usaha terkait hal ini⁵. Penelitian lain tentang *civil society* di Jepang yang menyimpulkan bentuk struktur interaksi antar *civil society* akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kepuasan stakeholder *civil society*. Kerjasama dan jaringan kerja yang kuat antar CSO (*civil society organization*) menjadi penting.⁶

Maksud taskap ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji serta menganalisis berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan perspektif peningkatan *civil society* guna pemajuan IPTEK dalam rangka ketahanan nasional. Dengan hasil kajian ini akan dapat dikembangkan *civil society* di Indonesia yang lebih baik dan dapat berkembang suatu lingkungan yang dinamis dan kondusif untuk mencapai tujuan nasional sebagai sebuah kesadaran semua komponen masyarakat; baik pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat.

Sedangkan tujuan penulisan taskap ini adalah untuk (1) mengetahui elemen-elemen penting apa saja yang ada di masyarakat yang menentukan terbentuknya *civil society* yang baik, (2) mengidentifikasi kondisi saat ini yang berpengaruh pada permasalahan yang ditemui dalam pengembangan *civil*

⁵ -, *Civil Society Contribution Towards Achieving The MDGs In The Gambia*, October 2005

⁶ Gabriele Vogt. (2006). *Facing the Challenge of Immigration? The State, Civil Society and Structures of Interdependence*, Tokyo

society di Indonesia, (3) menentukan berbagai alternatif strategi dan upaya dengan memperhatikan lingkungan strategis dalam rangka peningkatan *civil society*. Orientasi dari tujuan ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan kepada lembaga atau penentu kebijakan dalam membangun daya saing bangsa.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan taskap ini dititikberatkan pada pembahasan tiga variabel penting, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dalam perspektif Peningkatan *civil society* (2) Pemajuan Iptek, dan (3) Ketahanan Nasional. Sehingga dalam penulisan akan dikupas selain keterkaitan antar variabel, kondisi yang ada saat ini, juga kebijakan, strategi, dan upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi ideal.

Konsep atau model yang banyak digunakan dalam pengembangan *civil society* dan sesuai penyelesaian masalah ini adalah konsep tentang *diamond of Civil society* yang dikembangkan oleh CIVICUS ketika melakukan pengukuran *civil society* Index.⁷ Model ini banyak dipakai dalam berbagai penelitian pengembangan dan penelitian kebijakan tentang *civil*

⁷ Jacob M. Mati, Federico Silva and Tracy Anderson, *Assessing and Strengthening Civil Society Worldwide: An updated programme description of the CIVICUS Civil Society Index: Phase 2008 to 2010*. April 2010

society (Neville Gabriel, 2003; Gabriele Vogt.,2006). Model ide melihat ada 5 dimensi dalam pengembangan *civil society*, yaitu: *Civic Engagement, Level of Organisation, Practice of Values, Perception of Impact,* dan *Context Dimension*. Model ini yang akan dipakai dalam tulisan ini untuk pemecahan masalah.

Tata Urut

Sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

- **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini bisa dirinci lebih lanjut terdiri dari beberapa sub bab/pasal, dan berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metoda dan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah, sistematika dan tata urut serta pengertian.

- **Bab II LANDASAN PEMIKIRAN**

Berisi pengantar untuk memasuki permasalahan yang akan dibahas ditinjau dari sudut pandang instrumental input dengan paradigma nasional sebagai bahasan inti serta Peraturan Perundang-undangan dan Landasan Teori sebagai bahasan tambahan. Dalam bab ini

- **Bab III KONDISI PENINGKATAN CIVIL SOCIETY SAAT INI**

Bab ini berisi pengantar untuk memasuki permasalahan yang akan dibahas, ditinjau dari kondisi multi sektoral.

Beberapa aspek Ketahanan Nasional dibahas untuk melihat keterkaitannya dengan isu variabel 1. Implikasi kondisi variabel pertama terhadap variabel kedua dan variabel ketiga juga akan dibahas untuk menemukan permasalahan yang dihadapi.

- **Bab IV PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS**

Berisi pengantar untuk memasuki permasalahan yang akan dibahas/ditinjau dari kondisi lingkungan strategis yang mencakup lingkungan global, regional, dan nasional. Perkembangan global/ internasional, regional, dan nasional terutama yang erat kaitannya dengan variabel dibahas untuk menemukan peluang dan kendala.

- **Bab V KONDISI PENINGKATAN CIVIL SOCIETY YANG DIHARAPKAN**

Dalam bab ini dibahas kondisi yang dikehendaki/ diharapkan atau kondisi *ideal*, dan pengaruh atau dampak (kontribusi) yang ditimbulkannya. Dengan hal ini dapat ditentukan beberapa indikator ketercapaian kondisi ideal tersebut.

- **Bab VI KONSEPSI PEMECAHAN MASALAH PENINGKATAN CIVIL SOCIETY**

Pada bab VI ini berisi suatu diskusi yang menggambarkan pengaruh, korelasi, saling ketergantungan dari aspek-aspek yang dibahas sebelumnya, sehingga sampai pada sebuah

rumusan bahwa perlunya diambil suatu kebijakan, strategi dan upaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

- **Bab VII PENUTUP**

Merupakan bab terakhir naskah yang terdiri dari Kesimpulan yang menjawab masalah-masalah yang dikemukakan dan dibahas, dan saran yang memuat harapan dan reaksi tindak lanjut dari pihak berwenang yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Metoda dan Pendekatan

Metoda dan pendekatan yang digunakan untuk membahas dan memecahkan masalah adalah deskriptif-obyektif dan deskriptif-analisis. Metode deskriptif merupakan metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dengan metode deskriptif dapat diungkap hubungan antar variabel, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal (*deductive and inductive reasoning*)⁸. Dengan metode ini, keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya (objektif).

⁸ Konsep ini dapat dilihat secara rinci di <http://www.answers.com/topic/deductive-reasoning-1> dan <http://www.answers.com/topic/inductive-reasoning>

5. Pengertian-pengertian

a. Civi Society

Penggunaan istilah masyarakat madani dan *civil society* di Indonesia sering disamakan atau digunakan secara bergantian. Hal ini dirasakan karena makna diantara keduanya banyak mempunyai persamaan prinsip pokoknya, meskipun berasal dari latar belakang sistem budaya negara yang berbeda. Setelah melalui berbagai kajian, dalam tulisan ini, pengertian *civil society* atau masyarakat madani yang digunakan adalah pengertian yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu:

*the wide array of non-governmental and not-for-profit organizations that have a presence in public life, expressing the interests and values of their members or others, based on ethical, cultural, political, scientific, religious or philanthropic considerations. Civil Society Organizations (CSOs) therefore refer to a wide of array of organizations: community groups, non-governmental organizations (NGOs), labor unions, indigenous groups, charitable organizations, faith-based organizations, professional associations, and foundations.*⁹

⁹ World Bank, Defining Civil Society [http:// web.worldbank.org/ WBSITE/ EXTERNAL/TOPICS/CSO/0](http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0)

b. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan Teknologi merupakan terjemahan dari science and technology. Definisi yang digunakan dalam tulisan ini merujuk definisi yang ada di Wikipedia. Perbedaan antara ilmu pengetahuan, rekayasa (engineering) dan teknologi sesungguhnya terkadang tidak terlalu jelas. Ilmu pengetahuan/ science adalah investigasi yang rasional atau kajian fenomena yang bertujuan untuk penemuan prinsip-prinsip atau hukum antar suatu elemen melalui metode saintifik. Sedangkan teknologi tidak selalu produk dari ilmu pengetahuan karena mencakup juga utilitas, keamanan, dan kemanfaatan. Sedangkan rekayasa adalah proses goal-oriented sistem perancangan dan pembuatan alat bantu untuk mengeksploitasi fenomena alam untuk kemampuan praktis manusia. Pengembangan teknologi akan mencakup berbagai pengetahuan bidang terkait sains, rekayasa, matematika, bahasa, dan sejarah untuk mencapai tujuan praktis. Dengan demikian teknologi merupakan konsekuensi ilmu pengetahuan dan rekayasa atau *technology is the usage and knowledge of tools, techniques, and crafts, or is systems or methods of organization, or is a material product of these things.*¹⁰

¹⁰

http://en.wikipedia.org/wiki/Technology#Science.2C_engineering_and_technology

c. Ketahanan nasional.

Ketahanan Nasional dapat didefinisikan dalam beberapa perspektif. Beberapa definisi adalah sebagai berikut:

- Pengertian secara Umum, Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan kekuatan atau potensi nasional dalam rangka untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dari luar maupun dari dalam, baik langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan eksistensi negara kita.
- Pengertian secara Konstitusional, ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis bentuk integritas kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara.
- Pengertian secara operasional, ketahanan nasional hakekatnya adalah kondisi dinamis suatu bangsa mengandung keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dan ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong dan berhasilnya pembangunan nasional.
- Pengertian sebagai Doktrin Dasar, ketahanan nasional diartikan sebagai suatu pandangan yang diyakini kebenarannya, dihayati dan ditanamkan dalam bentuk pola pikir, pola sikap, pola tindak dan tingkah laku,

sehingga akan terbentuk pola tindak dan tingkah laku pengelolaan sistem kehidupan nasional yang memiliki kemampuan dan kekuatan nasional yang dibutuhkan dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan kehidupan nasional.

- Pengertian sebagai Metode. Metode yang digunakan ketahanan nasional dalam pengelolaan sistem kehidupan nasional adalah metode Astagatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra.¹¹

Sehingga secara umum dapat dirangkum ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

¹¹ Manalu, L. (2010) *Mewujudkan Ketahanan Nasional*, <http://liamanalu.blogspot.com/2010/02/mewujudkan-ketahanan-nasional.html>, Rabu, 03 Februari 2010

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

1. Umum

Bab ini membahas tentang bagaimana *civil society* akan dibangun di Indonesia. Aspek yang dibahas mencakup paradigma nasional (Pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional), peraturan perundangan yang menjadi pijakan operasional pelaksanaan *civil society*, latar belakang teori yang digunakan untuk membangun rasionalitas peningkatan *civil society* yang mencakup konsep, model, dan indikator keberhasilan *civil society*, korelasi *civil society* dengan ketahanan nasional dan juga tinjauan pustaka dari berbagai hasil penelitian maupun laporan terkait dengan peningkatan *civil society* di berbagai negara dalam berbagai aspek.

2. Paradigma Nasional

a. Pancasila sebagai Landasan idiil

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia pada hakekatnya, mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Perpaduan nilai-nilai tersebut mampu mewartakan ke Bhinekaan seluruh aspirasi bangsa

Indonesia. Pancasila merupakan sumber motivasi bagi perjuangan didalam NKRI secara berdaulat dan mandiri. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para penyelenggara negara, para pimpinan pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia.

Pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di aktualisasikan dengan mensyukuri segala anugerah Sang Pencipta baik dalam wujud konstelasi dan posisi geografi maupun segala isi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah Nusantara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan harkat, martabat bangsa dan negara Indonesia dalam pergaulan antar bangsa. Demikian juga dalam peningkatan *civil society* atau masyarakat madani perlu memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Ciri-ciri masyarakat madani yang diharapkan (ruang publik yang bebas, demokratisasi, toleransi, pluralisme, keadilan sosial, partisipasi sosial, supremasi hukum) adalah sesuai dengan bentuk masyarakat yang ideal sesuai dengan cita-cita Pancasila.¹²

b. UUD NRI 1945 sebagai Landasan Konstitusional

UUD NRI 1945 merupakan landasan konstitusional

¹² -,2010, *Ciri-Ciri Masyarakat Madani*,
http://www.crayonpedia.org/mw/CiriCiri_Masyarakat_Madani

bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dalam perkembangannya sesuai dinamika konstitusi muatan UUD NRI 1945 telah mengalami amandemen sebagai upaya penyempurnaan. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Beberapa pasal yang sangat bersesuaian dengan *civil society* dalam UUD NRI 1945 adalah:

Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28C

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak

dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional

Wawasan nusantara dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta dan penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi. Berdasarkan kesadaran yang dipengaruhi oleh lingkungannya, manusia Indonesia memiliki motivasi antara lain untuk menciptakan suasana damai dan tenteram menuju kebahagiaan serta menyelenggarakan keteraturan dalam membina hubungan antar sesama.

d. Ketahanan Nasional Sebagai Landasan Konsepsional

Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui

pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dalam negeri.

Ketahanan Nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek terutama aspek-aspek dinamis di dalam tata kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sangat kompleks dan amat sulit dipantau. Dalam rangka pemahaman dan pembinaan tata kehidupan nasional tersebut, diperlukan penyederhanaan tertentu dari berbagai aspek kehidupan nasional.

3. Peraturan dan Perundangan Terkait

- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025. Salah satu misi dalam RPJP Nasional 2005-2025 yang menduduki urutan nomor satu (dari delapan misi seluruhnya), adalah “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”. Hal tersebut secara tegas mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk mengimplementasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Prioritas pembangunan yang dicanangkan dalam RPJMN 2010-2014 diantaranya adalah pembangunan jati diri bangsa dan pelestarian budaya, pengembangan kebudayaan yang diarahkan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, dengan sasaran semakin berkembangnya proses internalisasi nilai-nilai luhur, pengetahuan dan teknologi tradisional, serta kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti nilai-nilai persaudaraan, solidaritas sosial, saling menghargai, serta rasa cinta tanah air. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai

Pancasila harus diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagai amanat perundang-undangan yang telah ditetapkan.

- c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/22/M/XII/2007 tentang Strategi Pertahanan Negara Republik Indonesia. Doktrin Pertahanan Negara berisi ajaran serta prinsip-prinsip fundamental yang digali dari pengalaman bangsa Indonesia serta dalam mengelola perkembangan lingkungan strategis baik global maupun regional. Ajaran dan prinsip fundamental dimaksud menuntun bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pertahanan negara. Dalam mengembangkan strategi pertahanan negara, Doktrin Pertahanan Negara menempati posisi yang sangat fundamental. Posisi doktrin tersebut menuntun pengembangan strategi pertahanan negara dalam merumuskan tiga substansi dasar strategi pertahanan, yang meliputi tujuan atau sasaran yang ingin dicapai (*ends*), sumber daya yang digunakan (*means*), serta cara mencapai tujuan (*ways*).
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/23/M/XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia. Doktrin Pertahanan Negara memiliki arti penting, yakni sebagai penuntun dalam pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Pada tataran strategis,

Doktrin Pertahanan Negara berfungsi untuk mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat semesta, baik pada masa damai maupun pada keadaan perang. Dalam kerangka penyelenggaraan pertahanan negara, esensi Doktrin Pertahanan Negara adalah acuan bagi setiap penyelenggara pertahanan dalam menyinergikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara terpadu, terarah, dan berlanjut sebagai satu kesatuan pertahanan.

- e. Undang-undang RI No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional.
- f. Undang-undang RI No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU itu bertujuan untuk mendorong terjadinya reformasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien dan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. KIP itu berasaskan keterbukaan dan akses informasi yang bisa diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana. Keberadaan Undang-Undang KIP akan menjadi kekuatan besar bagi

masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap badan publik, baik swasta maupun pemerintah. Dalam Pasal 4 tentang Hak Publik, terutama Ayat 1 dan 2, disebutkan:

- (1) *Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang ini.*
- (2) *Setiap Orang berhak: a) Melihat dan mengetahui Informasi Publik .b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik c) Mendapatkan Salinan Informasi Publik Sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan-perundangan. d) Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan-peraturan Perundang-undangan.*

Dengan UU ini masyarakat diberi ruang yang luar bisa untuk mengakses informasi. Bukan hanya soal kebijakan, namun juga menyangkut informasi penggunaan anggaran. Masyarakat juga dapat melakukan gugatan jika hak dalam mendapatkan salinan informasi publik tidak diberikan badan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 4 UU tersebut yang menyebutkan:

Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

g. Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 1c dijelaskan, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

4. Latar Belakang Teori

Konsep Dasar Civil Society

Penggunaan istilah masyarakat madani dan *civil society* di Indonesia sering disamakan atau digunakan secara bergantian. Hal ini dirasakan karena makna diantara keduanya banyak mempunyai persamaan prinsip pokoknya, meskipun berasal dari latar belakang sistem budaya negara yang berbeda.

Adam Seligman mengemukakan dua penggunaan istilah *Civil society* dari sudut konsep sosiologis. Yaitu, dalam tingkatan kelembagaan dan organisasi sebagai tipe sosiologi politik dan membuat *civil society* sebagai suatu fenomena dalam dunia nilai

dan kepercayaan. Untuk yang pertama, *civil society* dijadikan sebagai perwujudan suatu tipe keteraturan kelembagaan. Dalam pengertian *civil society* dijadikan jargon untuk memperkuat ide demokrasi, yang menurut Seligman dikembangkan oleh T.H. Marshall. Atau dengan kata lain bicara *civil society* sama dengan bicara demokrasi. Dan *civil society* ini merupakan obyek kajian dalam dunia politik (sosiologi politik, antropologi politik, dan *social thoughts*).

Sedangkan yang kedua, *civil society* menjadi wilayah kajian filsafat yang menekankan pada nilai dan kepercayaan. Yang kedua ini menurut Seligman, kajian *civil society* sekarang ini mengarah pada kombinasi antara konsep Durkheim tentang moral individualism dan konsep Weber tentang rasionalitas bentuk modern organisasi sosial, atau sintesa Talcott Parsons tentang karisma Weber dan *individualism Durkheim*¹³.

Dalam wacana *civil society I* di Indonesia lebih menekankan aspek horizontal dan biasanya dekat dengan aspek budaya. *Civil society* di sini erat dengan “*civility*” atau keberadaban dan “*fraternity*”. Aspek ini dibahas pemikir masyarakat madani atau madaniah yang mencoba melihat relevansi konsep tersebut (semacam “*indigenisasi*”) dan menekankan toleransi antar agama. Analisis utama dalam

¹³ A. Qodri Abdillah Azizy, *Masyarakat Madani Antara Cita dan Fakta: Kajian Historis-Normatif*, dalam Ismail dan Mukti, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2000

kelompok ini adalah Nurcholish Madjid yang mencoba melihat *civil society* berkaitan dengan masyarakat kota madinah pada jaman Rosulullah. Menurut Madjid, piagam madinah merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi, sementara toleransi di Eropa (Inggris) baru dimulai dengan *The Toleration Act of 1689*.¹⁴ Penggunaan konsep madani ini mendapat kritik dari kelompok yang menggunakan “*civil society*” dengan Muhammad Hikam sebagai pemikir utamanya. Perdebatan utamanya terletak pada bentuk masyarakat ideal dalam *civil society* tersebut. Walaupun kedua kelompok tersebut erat dengan “Islam cultural” namun contoh masyarakat Madinah kurang mencerminkan relevansi dengan Indonesia.¹⁵

Selain *civil society* dan masyarakat madani, konsep masyarakat warga atau kewargaan digunakan pula oleh Ryaas Rasyid dan Daniel Dhakidae. Wacana dalam *civil society II* memfokuskan pada aspek “*vertical*” dengan mengutamakan otonomi masyarakat terhadap negara dan erat dengan aspek politik. Dalam *civil society II*, istilah “*civil*” dekat dengan “*citizen*” dan “*liberty*”. Terjemahan yang diIndonesiakan adalah Masyarakat warga atau masyarakat kewargaan dan digunakan oleh ilmuwan politik . Pemahaman *civil society II* intinya

¹⁴ Iwan Gardono Sujatmiko, Wacana Civil Society di Indonesia, *Jurnal Sosiologi* edisi No.9, 2001, Jakarta, Penerbit Buku Kompas

¹⁵ Ibid

menekankan asosiasi diantara individu (keluarga) dengan negara yang relatif otonom dan mandiri. Namun, terdapat perdebatan apakah partai politik atau konglomerat termasuk disini atau apakah semua organisasi yang non-negara merupakan *civil society*. Jadi *civil society II* dapat bermakna beragam dan ada pula yang mndefinisikan “*civil society*’ sebagai “*the third sector*” yang berbeda dari pemerintah dan pengusaha.¹⁶

Pembahasan *civil society III* merupakan upaya untuk mempertemukan *civil sosiey I* dan *civil society II*. Kombinasi antara *Civil society I* dan *II* yang menjadi *civil society III* telah dibahas oleh Afan Gaffar di bukunya Politik Indonesia; *Transisi Menuju demokrasi* (1999). Dibahas pula oleh Paulus Wirutomo dalam pidato pengukuhan Guru Besar yang berjudul *Membangun Masyarakat Adab: Suatu Sumbangan Sosiologi*. Konsep *civil society III* ini yang dirasa relevan dengan masyarakat Indonesia dimana keadaan vertical (antar lapisan dan kelas), seperti demokratisasi dan partisipasi erat kaitannya dengan situasi horizontal atau SARA. Kedua aspek tersebut mengalami represi dan sejak reformasi 1998 muncu ke permukaan dan membutuhkan perhatian dalam proses re-integrasi.¹⁷

Maka dari itu, perspektif masyarakat madani di

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

Indonesia dapat dirumuskan secara sederhana, yaitu membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan taqwa kepada Allah dalam arti semangat ketuhanan Yang Maha Esa. Ditambah legalnya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur, seperti toleransi dan juga pluralisme, adalah merupakan kelanjutan nilai-nilai keadaban (*tamaddun*). Sebab toleransi dan pluralisme adalah wujud ikatan keadaban (*bond of civility*).¹⁸

¹⁸ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2001

Model Civil Society

Ada beberapa model tentang *civil society* Program CSI (Civil society Index) yang dilakukan oleh CIVICUS mendefinisikan konsep *civil society* sebagai¹⁹:

Arena atau ruang di luar keluarga, pemerintah, dan pasar yang diciptakan oleh kegiatan individu maupun kelompok, organisasi dan institusi untuk peningkatan kualitas interes atau keinginan.

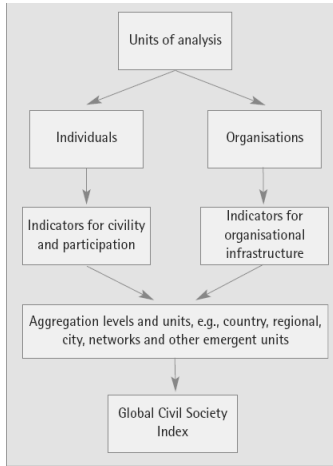
Meski dapat dilihat bahwa pelaku *civil society* ada tiga (CSO, GOV, dan BUS)²⁰, namun terlihat disini adanya wilayah yang agak kabur untuk memisahkan keluarga,

pemerintah, dan pasar. Dengan konsep ini maka dikembangkan model *civil society* sebagai *diamond of CS* sebagaimana gambar berikut. Dengan model ini ada 5 dimensi penting *civil society*, yaitu:

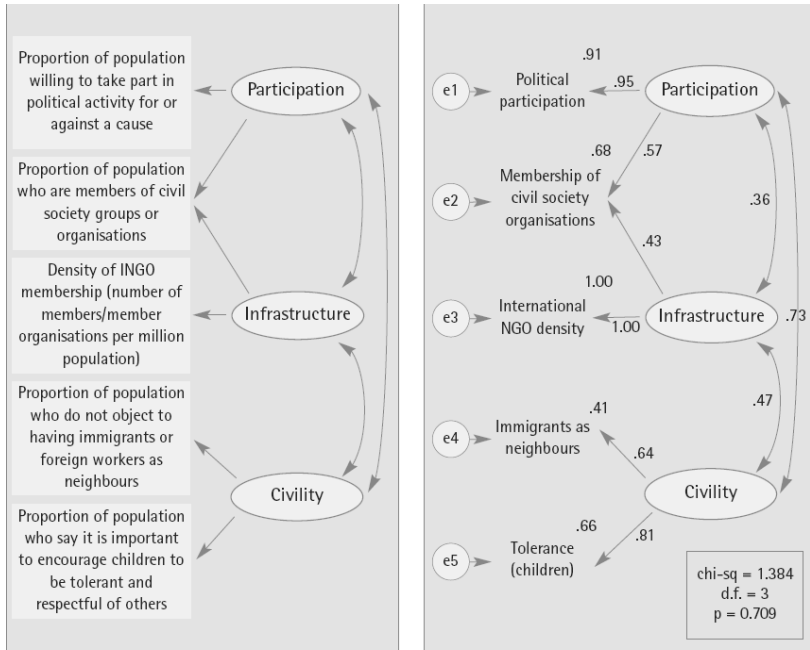


¹⁹ Jacob M. Mati, Federico Silva and Tracy Anderson, *Assessing and Strengthening Civil Society Worldwide: An updated programme description of the CIVICUS Civil Society Index: Phase 2008 to 2010*. April 2010

²⁰ Singkatan dari: CSO= civil society organization, GOV= government, BUS= business



- a. *Civic Engagement* sebagai faktor penting yang menggambarkan aktivitas formal dan non formal serta partisipasi yang dilakukan baik secara individu untuk berbagi dalam berbagai level
- b. *Level of Organisation* yang menggambarkan tingkat kecanggihan, kompleksitas, dan pengembangan organisasi dengan memperhatikan hubungan antar institusi dan lembaga yang berperan dalam ruang *civil society*.
- c. *Practice of Values* merupakan gambaran pengembangan dan penerapan nilai-nilai bersama dalam *civil society* melalui serangkaian interaksi.
- d. *Perception of Impact* menggambarkan tingkat pengaruh atau implikasi aktivitas *civil society* pada perubahan yang lebih baik yang dilakukan oleh para pelaku *civil society*.
- e. *Context Dimension* menggambarkan pengaruh lingkungan eksternal dalam perubahan langsung maupun tidak langsung pada *civil society* terkait sosial, politik, maupun ekonomi.



Model ini juga relatif sama dengan yang dikembangkan oleh Jide Balogun²¹ dengan memberikan penekanan pada orientasi kognitif dan afektif untuk para pelaku *civil society*, persepsi publik terkait kompetensi, integritas dan efektivitas, dan kapasitas kepemimpinan dan organisasi lembaga masyarakat. Model lain adalah dari proposal GCSI (Global Civil society Index) yang relatif sama dengan model dari CSI dalam definisi *civil society*, hanya saja pelaku CS adalah family, market, and state, sehingga unit analisis akan mencakup dua hal yaitu (1) individuals terkait dengan ide, nilai,

²¹ Jide Balogun, *Agency Governance Indicators, African Training and Research Centre in Administration for Development*

identitas, opini, dan kegiatan, dan (2) organisations yang mencakup asosiasi dan jaringan kerjanya dalam berbagai bentuk.²²

Model ini selanjutnya dikembangkan seperti pada gambar berikut untuk pengukuran keberhasilan peningkatan *civil society*. Ada tiga kunci pendukung keberhasilan ketiga pelaku CS yaitu: partisipasi, infrastruktur, dan kewargaan (*civility*). Hubungan ketiga pendukung ini ditunjukkan pada gambar berikut.

Korelasi Prinsip Civil society dan Sifat Ketahanan Nasional

Masyarakat madani sebagai kelompok-kelompok sosial dan politik yang muncul berdasarkan inisiatif dari masyarakat, dengan ciri utamanya memiliki kemandirian (otonomi) terhadap negara.²³ Sebuah masyarakat (negara) yang dipimpin oleh orang yang adil dan bijaksana serta mempunyai undang-undang untuk mengatur kehidupan mereka sehingga kehidupan, keamanan dan ketentraman masyarakat bisa terjamin. Dengan karakteristik nonrasisme dan regionalisme.²⁴

Masyarakat madani mengharapkan terwujudnya kemajuan, kesejahteraan, kebahagiaan, keterbukaan, keadilan, saling menghormati dan menghargai, menegakkan hukum dengan adil,

²² Helmut K. Anheier and Sally Stares "Introducing the Global Civil Society Index" In Marlies Glasius, Helmut K. Anheier, and Mary Kaldor (eds.) *The Global Civil Society Yearbook*. Oxford: Oxford University Press, pp 241-254.

²³ Adi Suryadi, *Masyarakat Madani di Indonesia: Studi Kasus Petisi 50*, <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=75964>

²⁴ Dr. M. Masykuri, M.Si., *Masyarakat Madani*

menghargai hak asasi manusia, modern dan ingin meninggalkan pola-pola kehidupan masyarakat KKN yang negatif.²⁵ Prinsip-prinsip masyarakat madani:

- a. demokrasi, sebagai ciri utama memiliki konsekuensi luas di antaranya adalah menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik, dengan organisasi-organisasi yang mandiri sehingga memungkinkan pengawasan aktif dari masyarakat terhadap pemerintah dan pembangunan;
- b. kepastian hukum, atau masyarakat yang diwarnai oleh *rule of law* bukan kekuasaan yang sangat dominan, tetapi hukumlah yang perlu ditegakkan;
- c. egalitarian, artinya suatu masyarakat yang memperjuangkan keadilan, memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat bukan hanya segelintir kelompok elite untuk maju dan berkembang;
- d. penghargaan yang tinggi atas *human dignity*;
- e. kemajemukan budaya dan bangsa dalam satu kesatuan, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang multietnik sekaligus multikultural; dan
- f. religius, yakni masyarakat sipil yang diinginkan bukan suatu masyarakat yang sekuler-materialistik, tetapi etis-religius.

²⁵ Dr. Diding Nurdin, M.Pd, Reformasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani, *Harian Pikiran Rakyat*, Minggu 23 Nopember 2008

Sedangkan sifat ketahanan nasional adalah:

- a. Mandiri. Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama. Kerjasama perlu dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh pihak lain
- b. Dinamis. Artinya tidak tetap, naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan kemasa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik.
- c. Wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa. Dengan ini diharapkan agar bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai dengan kualitas yang melekat padanya. Atas dasar pemikiran diatas, maka berlaku logika, semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka akan semakin tinggi wibawa negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan nasional.
- d. Konsultasi dan kerjasama. Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada moral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakan secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing didalam rangka hubungan ini diharapkan

tidak ada usaha mengutamakan konfrontasi serta tidak ada hasrat mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata.

Memperhatikan prinsip *civil society* dan sifat ketahanan nasional, dapat dibuat korelasi keduanya sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1 Korelasi Sifat Ketahanan Nasional dan Prinsip Civil Society

Sifat Ketahanan Nasional	Prinsip Civil Society
Mandiri	1. penghargaan yang tinggi atas <i>human dignity</i> 2. religius
Dinamis	3. egalitarian 4. kemajemukan budaya dan bangsa
Wibawa	5. kepastian hukum
Konsultasi dan kerjasama	6. demokrasi

Korelasi Prasyarat Civil society dan Asas Ketahanan Nasional

Dengan memperhatikan prasyarat masyarakat madani atau *civil society* dan diperbandingkan dengan asas-asas ketahanan nasional, korelasi keduanya dapat dilihat dengan jelas. Beberapa prasyarat masyarakat madani, diantaranya:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
- b. Berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.

- c. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
- d. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
- e. Adanya kohesitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
- f. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
- g. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalannya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

Dari beberapa prasyarat tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan

program-program pembangunan di wilayahnya.²⁶

Sebelum membuat korelasi keduanya, ada baiknya diperhatikan terlebih dahulu bagaimana paradigma Pancasila sebagai dasar berfikir wawasan nusantara dibandingkan paradigma sosialis komunis dan liberal. Tabel berikut menunjukkan perbedaan ketiganya.

Tabel 2 Perbandingan Paradigma Pancasila dan Paradigma Dunia

Sosialis Komunis	Pancasila	Liberal
1. Ateistis	1. Monoteistis	1. profane/sekuler
2. Menonjolkan kepribadian kesosialan manusia	2. Memperpadukan kepribadian dengan kesosialan negara	2. menonjolkan kepribadian 3. menonjolkan hak-hak azasi
3. Mengambatkan hak-hak azasi	3. Hak-hak azasi terpadu dengan kewajiban azasi	4. Mengutamakan kebebasan
4. Mengurangi kebebasan	4. Kebebasan	5. Mengabaikan kebangsaan 6. Ada oposisi, ada

²⁶ Dr. Edi Suharto Msc, *Masyarakat Madani: Aktualisasi Profesionalisme Community Workers Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan*, http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_16.htm

5. Menolak kebangsaan	yang bertanggung jawab	perbedaan pendapat
6. Tidak ada oposisi tidak ada perbedaan	5. Menjunjung tinggi kebangsaan	7. Dominasi mayoritas
7. Dominasi partai	6. Tidak ada oposisi tanpa alasan tetapi ada persatuan pendapat	8. Putusan melalui pungutan suara
8. Putusan di tangan partai	7. Tidak ada dominasi	9. Mengutamakan mayoritas yang menang
9. Mengutamakan kepentingan negara	8. Putusan melalui pungutan suara dan musyawarah.	
	9. Mengutamakan kepentingan rakyat.	

(Sumber: Modul Ideologi, Lemhannas, 2010)

Dari tabel 2 di atas, *civil society* atau masyarakat madani yang akan dikembangkan haruslah sesuai dengan nilai-nilai

Pancasila sebagai dasar paradigma. Asas ketahanan nasional adalah asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif/ menyeluruh terpadu, dan asas kekeluargaan. Asas ini bukanlah satu hal yang saling terpisah, namun merupakan hal yang menyatu dan saling berkelindan. Bila dalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan merupakan hal yang utama, maka seluruh aspek trigatra maupun pancagatra harus dapat dirasakan secara proporsional dan adil oleh masyarakat yang ada di wilayah yang berbeda²⁷. Dengan komponen bangsa lain, semua pemanfaatan potensi tersebut perlu dioorientasikan pada kesejahteraan dan keamanan bersama. Perhatian yang menyeluruh dalam peningkatan kesejahteraan dan keamanan perlu secara bersamaan menumbuhkan sikap adil, respek dan empati pada yang lain sebagai ciri asas kekeluargaan.

²⁷ Hendaknya hasil-hasil pemanfaatan kekayaan alam dan potensi lain dapat digunakan dengan pendekatan subsidi silang (cross subsidiary). Hal ini karena bisa jadi satu wilayah unggul pada aspek tertentu namun lemah pada asepek yang lain. Demikian sebaliknya dengan wilayah lain. Sehingga otonomi daerah perlu diimplementasi secara hati-hati agar tidak menjadi ancaman disintegrasi.

Tabel 3 Korelasi Prasyarat Masyarakat Madani dan Asas Ketahanan Nasional

Prinsip Masyarakat Madani	Asas Ketahanan Nasional
1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.	Kesejahteraan dan keamanan
2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.	
3. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.	Komprensif/ menyeluruh terpadu
4. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.	
5. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.	Kekeluargaan
6. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.	
7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.	

Dalam membangun ketahanan nasional, Indonesia tidak dapat lepas dari interaksi pergaulan internasional. Interaksi ini akan berjalan lancar ketika kedua belah pihak memiliki kesederajatan. Kesadaran ini akan dapat membentuk interaksi yang saling ketergantungan kedua belah pihak untuk saling bekerja sama. Untuk dapat mencapai tingkatan seperti ini, bangsa Indonesia (atau bangsa manapun) perlu untuk menjadi mandiri terlebih dahulu. Implikasi dari kemandirian adalah wibawa. Hal ini yang juga menjadi dasar pada sifat-sifat ketahanan nasional.

Dengan asas dan sifat ketahanan nasional sebagaimana dibahas tadi, Bangsa Indonesia dapat secara aktif untuk mengembangkan daya saing bangsa. Dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional memiliki kedudukan sebagai ajaran dan landasan konseptual yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik (paradigma) dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan (pembangunan nasional). Ketahanan nasional nasional memiliki fungsi sebagai doktrin dasar nasional untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter – regional (wilayah), inter – sektoral maupun multi disiplin. Dengan beberapa argumen di atas, dapat dilihat bagaimana hubungan antara prinsip *civil society* dan asas ketahanan nasional. Ringkasan hubungan keduanya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.

Indikator Civil Society

Pemahaman bahwa *civil society* merupakan integrasi aktivitas antara pemerintah, masyarakat, dan dunia bisnis atau pasar mendorong untuk pemilihan indikator keberhasilan *civil society* pada aspek-aspek yang merangkum ketiganya. Dalam kasus ini penggunaan MDGs sebagai indikator kemajuan dan peningkatan *civil society* menjadi sangat sesuai²⁸.

Tabel 4 Perbandingan Paradigma Pancasila dan Paradigma Dunia

Tujuan 1. Menangulangi Kemiskinan dan Kelaparan
<ul style="list-style-type: none">• Target 1 Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US\$1 per hari menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015• Target 2 Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015
Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
<ul style="list-style-type: none">• Target 3 Menjamin pada tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar
Tujuan 3. Mendorong Kestetaraan Gender dan Pemberdayaan

²⁸ Deklarasi Milenium menghimpun komitmen untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi, dan kebebasan fundamental dalam satu paket.

Perempuan

- Target 4 Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak

- Target 5 Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-pertiganya dalam kurun waktu 1990 – 2015

Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

- Target 6 Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya dalam kurun waktu 1990 – 2015

Tujuan 6 . Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit t Menular Lainnya

- Target 7 Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunkannya jumlah kasus baru pada tahun 2015
- Target 8 Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunkannya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015

Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

- Target 9 Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang
- Target 10 Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015

- Target 11 Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020

Tujuan 8. Membangun Kemitran Global untuk Pembangunan

- Target 12 Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif.
- Target 15 Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang
- Target 16 Bekerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang baik dan produktif bagi penduduk usia muda
- Target 18 Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi

5. Tinjauan Kepustakaan

Ada beberapa hasil penelitian yang membahas tentang peran *civil society* atau masyarakat madani dalam pengembangan daya saing bangsa. Seperti diketahui bahwa masyarakat madani yang baik akan secara otomatis mendorong terjadinya pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini karena sudah menjadi kesadaran dan fenomena umum bahwa IPTEK menjadi titik unkit bagi peningkatan daya saing bangsa. Beberapa ulasan hasil penelitian dan

kajian tersebut dituliskan sebagai tinjauan pustaka. Hasil penelitian yang digunakan sebagai kajian dipilih dari beberapa negara yang karakteristiknya berbeda (Gambia, China, Indonesia, Burma, Jepang) dengan harapan dapat diambil praktek baik (*best practices*) untuk pemberdayaan *civil society* guna pemajuan IPTEK dalam rangka ketahanan nasional.

Civil Society Contribution Towards Achieving The MDGs In The Gambia

Penelitian ini berkaitan dengan pengukuran dan penilaian kontribusi *civil society Organizations* dalam pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) di Gambia²⁹. Dalam mencapai target MDGs, pemerintah menyadari bahwa tujuan tidak akan dapat dicapai dengan kerja sendiri namun harus ada pelibatan stakeholder yang lain. Hal utama yang dilakukan adalah membangun kerjasama antara public, private sector dan komunitas NGO untuk meningkatkan efektivitas kolektif dalam mencapai MDGs. Latar belakang kajian inia memang untuk menggambarkan kerja pencapaian MDGs yang perlu didukung oleh komunitas *civil society* melalui kontribusi efektif melawan kemiskinan dan mengembangkan pembangunan berkelanjutan. *civil society* perlu menempatkan target MDGs dalam kerja pengembangan mereka. Hasilnya adalah semua NGO di

²⁹ -, *Civil Society Contribution Towards Achieving The MDGs In The Gambia*, October 2005

Gambia memiliki komitmen untuk membangun masyarakat/komunitas meraih kebutuhan pembangunan dasar. Koordinasi usaha-usaha dan peningkatan sinergi antar NGO sendiri akan mempercepat capaian MDGs. Tenaga dorong kajian ini adalah untuk mengundang organisas-organisasi *civil society* (sebagai mitra strategis pemerintah) dalam merespon perubahan lingkungan. Dialog antara kelompok *civil society* dan pemerintah perlu didorong kepada semua orang dalam membangun sesuai konsensus national dengan semua orang melalui strategi tertentu.

Facing the Challenge of Immigration? The State, Civil society and Structures of Interdependence

Dari penelitian ini dapat diketahui bagaimana peran CSO di Jepang³⁰.

Penelitian ini berusaha mengungkap fakta dan gambaran migrasi pekerja ke Jepang. CSO memiliki peran dan mempengaruhi fenomena ini, karena di Jepang CSO merupakan aktor untuk lobi. Struktur politik dengan posisi yang saling ketergantungan antara state dan non-state actor di Jepang sangat mempengaruhi bentuk kebijakan dalam pengelolaan perpindahan tenaga kerja baik regional maupun internasional.

Penelitian ini juga telah menelusuri bahwa aktivitas

³⁰ Gabriele Vogt. (2006). *Facing the Challenge of Immigration? The State, Civil Society and Structures of Interdependence*, Tokyo

transnasional yang dilakukan oleh *Ijuren* sebagai salah satu CSO di Jepang mampu untuk meningkatkan komunikasi antar lembaga dalam akuntabilitas politik, dan informasi politik. Hanya saja memang keterlibatan CSO sebagai aktor dalam melakukan lobi dengan pemerintah, asosiasi ekonomi, dan organisasi internasional akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian target CSO.

The Millennium Development Goals: Towards a Civil society Perspective on Reframing Poverty Reduction Strategies in Southern Africa³¹

Latar penelitian ini adalah kesadaran bahwa Afrika Selatan merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas kemiskinan terkait dengan ketidakpastian ketersediaan pangan, krisis HIV/AIDS, ketidakseimbangan antara perdangangan, hutang, dan bantuan, penyelenggaraan sistem demokrasi. Usaha-usaha perbaikan pada aspek ini akan dapat memperbaiki capaian MDGs. Dalam penelitian ini CSO didefinisikan sebagai *non-governmental organisations (NGOs), includes a wide spectrum of community-based organisations, trade unions, religious communities, advocacy groups, policy research institutions, private business institutions, and social movements.*

Peran CSO menjadi sangat beragam termasuk dalam

³¹ Neville Gabriel, *The Millennium Development Goals: Towards a Civil Society Perspective on Reframing Poverty Reduction Strategies in Southern Africa*, the Southern Africa MDGs Forum, Johannesburg, 2003

konsultasi program pembangunan yang dilakukan pemerintah di level daerah. Orientasi CSO difokuskan pada pencapaian MDGs terutama dalam memerangi kemiskinan dan transformasi kebijakan dan pengelolaan untuk sasaran pembangunan masyarakat. Hanya saja memang CSO relatif kurang efektif dalam support pencapaian MDGs karena beberapa kendala seperti karena kesalahan informasi (*lack of information*) dengan anggapan bahwa MDGs merupakan program yang dilakukan hanya oleh pemerintah saja melalui *global multilateral government*. Selain fakta di Afrika Selatan menunjukkan bahwa CSOs terpecah-pecah dalam aktivitasnya sesuai dengan peran dan situasi alamiah karena proses transformasi sosial dan sasaran pembangunan. Beberapa rekomendasi diberikan untuk meningkatkan peran CSO terutama dalam peningkatan efektivitas penurunan kemiskinan melalui koalisi dan aliansi dengan berbagai pihak berkepentingan.

BAB III

KONDISI PENINGKATAN CIVIL SOCIETY SAAT INI

1. Umum

Pada bagian ini akan dibahas terkait beberapa hal. Pertama adalah kondisi saat ini sesuai fakta-fakta tentang peningkatan *civil society* (sebagai variabel ke-1) yang membawa pengaruh terhadap Pemajuan IPTEK (sebagai variabel ke-2) dan pengaruh IPTEK (sebagai variabel ke-2) terhadap Ketahanan Nasional (sebagai variabel ke-3). Kedua bagaimana implikasi kondisi peningkatan *civil society* terhadap pemajuan teknologi dan juga terhadap ketahanan nasional. Pada bagian akhir bab ini akan diungkap persoalan-persoalan yang merupakan akar masalah dari berbagai permasalahan (fenomena, symptom) terkait dengan peningkatan *civil society*. Keluaran dari bab ini merupakan identifikasi akar masalah untuk dicarikan penyelesaiannya melalui proses perumusan kebijakan, strategi dan upaya yang akan dianalisis di Bab V dengan memperhatikan lingkungan strategis.

2. Kondisi Peningkatan Civil society Saat Ini

Untuk keruntutan berfikir dalam memandang kondisi saat ini terkait peningkatan *civil society*, akan digunakan konsep Hyden tentang indikator *civil society*. Menurut Hyden, dkk. ada

lima indikator untuk mengukur implementasi *civil society* yang baik³², yaitu:

- a. *Freedom of Expression*. Indikator ini bertujuan untuk memperoleh bagaimana aturan-aturan mengenai peluang masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memanfaatkan informasi.
- b. *Freedom of Assembly*. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh apa masyarakat dapat membentuk dan bergabung dalam asosiasi yang diinginkan.
- c. *Freedom from Discrimination*. Indikator ini bertujuan untuk menilai tingkat toleransi antar individu dan kelompok dalam masyarakat secara adil.
- d. *Input into Policy-making*. Indikator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah mendorong dalam konsultasi dengan masyarakat mengenai isu-isu publik. Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan adalah ukuran keberhasilan aktivitas.
- e. *Respect for Rules*. Indikator ini bertujuan untuk memperoleh sejauh mana masyarakat menghargai aturan yang penting bagi tujuan masyarakat umum dan kestabilan pemerintahan sehingga terbentuk pemerintahan yang akuntabel.

³² Goran Hyden, Julius Court and Ken Mease (2003) *Civil Society And Governance In 16 Developing Countries*, World Governance Survey Discussion Paper, July 2003

Dari hasil pengukuran (lihat tabel) diperoleh bahwa di Indonesia *civil society* memiliki skor tinggi (diatas rata-rata) untuk kebebasan berekspresi (4.26 dari 3.45; hal ini karena ledakan jumlah media massa), berkumpul (4.29 dari 3.6; hal ini terlihat dari jumlah organisasi kemasyarakatan yang banyak tumbuh), dan keterlibatan dalam memberi masukan pada pembuatan kebijakan (3.23 dari 2.57; terlihat pada keterlibatan masyarakat), namun cukup dalam kebebasan atas diskriminasi (2.94 dari 2.94; hal ini terlihat pada jumlah kasus diskriminasi di masyarakat) dan rendah dalam penghargaan atas peraturan (2.31 dari 2.61; hal ini terlihat pada jumlah pelanggaran hukum).

Kebebasan Berekspresi

Dalam kebebasan berekspresi dapat dilihat pada beberapa sub indikator, yaitu: (a) tingkat pemanfaatan IT dalam komunikasi (e-government), (b) tingkat densitas sarana komunikasi, dan (c) tingkat pemakaian media massa.

Tabel 5 Tingkat Implementasi Civil Society di Beberapa Negara

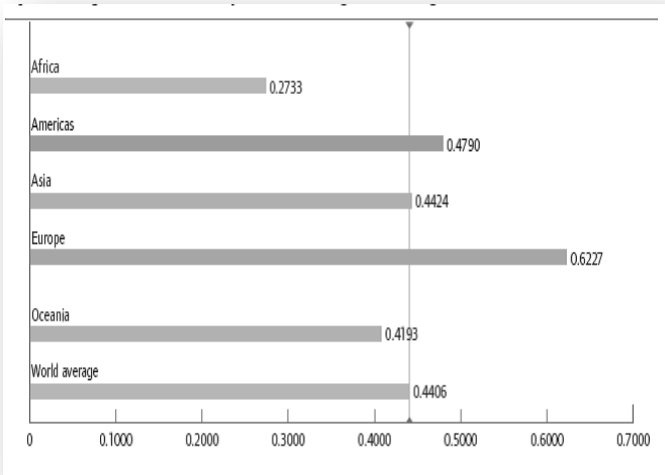
Country	Expression	Assembly	Discrimi- nation	Policy Input	Respect for Rules	Country Average
High scoring country						
Chile	3.7	4.27	3.43	2.87	3.6	3.57
India	4.11	4.39	3.06	2.61	2.5	3.33
Jordan	3.33	3.45	3.05	2.9	3.3	3.21
Mongolia	3.33	3.85	2.95	2.38	2.97	3.1
Tanzania	3.45	2.97	2.58	2.73	3.03	2.95
Thailand	4.22	4.32	3.41	3.59	3	3.71
Medium scoring country						
Argentina	3.97	4.49	2.77	1.86	2.43	3.1
Bulgaria	3.37	3.76	2.66	2.37	2.56	2.94
China	2.76	1.82	2.76	2.45	2.45	2.45
Indonesia	4.26	4.29	2.94	3.23	2.31	3.41
Peru	3.43	4.05	3.19	2.81	1.97	3.09
Low scoring country						

Kyrgyzstan	3	3.15	3.12	2.74	2.36	2.87
Pakistan	2.94	2.03	2.45	1.91	1.97	2.26
Philippines	4	4	2.6	2.49	2.46	3.11
Russia	2.84	3.76	3.26	2.34	2.42	2.93
Togo	2.55	3.02	2.86	1.79	2.43	2.53
Model Result	3.45	3.6	2.94	2.57	2.61	3.04

Sumber: Goran Hyden, Julius Court and Ken Mease (2003) CIVIL SOCIETY AND GOVERNANCE

IN 16 DEVELOPING COUNTRIES, World Governance Survey Discussion Paper, July 2003

a. Tingkat Pemanfaatan IT



Gambar 1 Tingkat Pemanfaatan IT untuk e-gov di Beberapa Region

Dari survei yang dilakukan oleh PBB melalui *United Nations E-Government Survey 2010* dapat diketahui posisi Indonesia dibandingkan posisi relatif negara lain dalam pemanfaatan e-government untuk pengembangan *civil society*³³. Hasil ini menunjukkan Asia merupakan wilayah ke-3 di dunia yang baik dalam pemanfaatan e-government untuk pengembangan *civil society* (gambar 1), sedangkan Indonesia merupakan negara ke-7 dari 11 negara di Asia Tenggara (tabel 2). Hal yang menunjukkan peran e-government belum optimal untuk pengembangan *civil society*. Sementara itu, salah satu negara maju yaitu Inggris telah menggunakan sarana IT ini

³³ UN, 2010, *United Nations E-Government Survey 2010: Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis*

dalam berbagai aktivitas termasuk dalam mengatur semua pintu masuk, cctv di berbagai tempat, sistem informasi kependudukan yang terintegrasi secara global dalam rangka pengendalian sistem keamanan nasional.³⁴

Country	E-government development index value		World e-government development ranking	
	2010	2008	2010	2008
Singapore	0.7476	0.7009	11	23
Malaysia	0.6101	0.6063	32	34
Brunei Darussalam	0.4796	0.4667	68	87
Thailand	0.4653	0.5031	76	64
Philippines	0.4637	0.5001	78	66
Viet Nam	0.4454	0.4558	90	91
Indonesia	0.4026	0.4107	109	106
Cambodia	0.2878	0.2989	140	139
Myanmar	0.2818	0.2922	141	144
Lao People's Democratic Republic	0.2637	0.2383	151	156
Timor-Leste	0.2273	0.2462	162	155
Sub-regional average	0.4250	0.4290		
World average	0.4406	0.4514		

Tabel 6 E-government Development in South-Eastern Asia

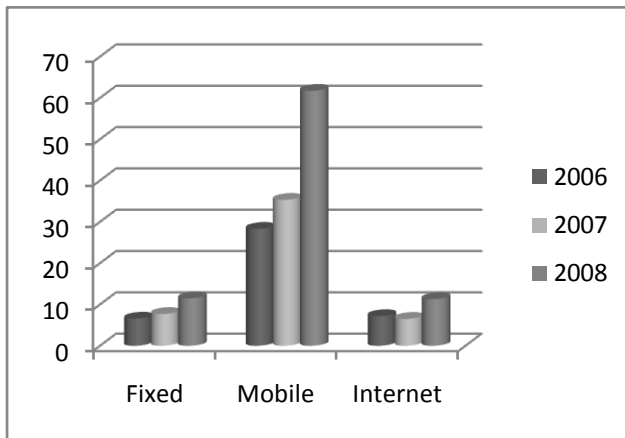
Selain itu isu korupsi yang ada di pemerintahan akan menjadi penghalang bagi implementasi *civil society* yang baik. Dari hasil survei tentang indeks persepsi korupsi (*The Corruption Perceptions Index* atau CPI) yang mengukur tingkat kesadaran

³⁴ Terlihat saat aktivitas SSLN Inggris pada (1) pengurusan visa yang terkoneksi sehingga saat peserta mengunjungi berbagai instansi nama-nama dan profil peserta sudah ada di receptionist, (2) pintu-pintu masuk setiap gedung (FCO, MOD, Northern Ireland Office) dikendalikan secara computerised, (3) pengunjung pameran DVD2010 tercatat dalam barcode untuk deteksi komunikasi.

korupsi sektor publik menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi 111 dari 180 atau 19 dari 33 negara Asia³⁵

b. Tingkat densitas sarana Komunikasi

Gambar 2 Modus Teknologi Akses Informasi



Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia dengan pertumbuhan pengguna Internet yang signifikan. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (www.apjii.or.id), jika pada tahun 1999 pengguna Internet di Indonesia baru mencapai 1 juta orang, maka pada akhir 2009 angkanya diprediksi mencapai 33 juta orang. Trafik bandwidth Internet nasional pada 2009 ini mencapai 20 Gbps, khususnya yang melalui Indonesia Internet eXchange (IIX). Padahal pada 1999,

³⁵ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2009*

bandwidth nasional baru mencapai 3 Mbps saja³⁶. Hanya saja pembangunan infrastruktur komunikasi di Indonesia masih belum merata dimana 80% pos dan telematika masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali (64% dari 306 ISP) dan Sumatera (18% dari 306)³⁷. Sedangkan teledensitas akses telekomunikasi sendiri tumbuh hampir dua kali lipat pertahun (lihat gambar 2). Sehingga gap antar wilayah juga semakin besar. Gap ini akan menjadi lebih besar ketika dipetakan atas kota dan desa.

c. Tingkat pemakaian media massa

Kebebasan berekspresi saat ini cenderung menguat dengan menggunakan internet. Hal tersebut sejalan dengan hasil pencatatan Alexa (<http://www.alexa.com>) per 8 November 2009, bahwa Facebook saat ini menduduki peringkat teratas sebagai sebuah situs yang paling sering dikunjungi pengguna Internet di Indonesia. Secara berurutan, 10 besar situs yang paling banyak dikunjungi dari Indonesia secara berurutan dari tertinggi adalah [Facebook.com](http://www.facebook.com) (situs jejaring social), [Google.co.id](http://www.google.co.id) (search engine), [Yahoo.com](http://www.yahoo.com) (mail & search engine), [Google.com](http://www.google.com) (mail & search engine), [Blogger.com](http://www.blogger.com) (blog service), [YouTube.com](http://www.youtube.com) (video sharing), [Wordpress.com](http://www.wordpress.com) (blog service), [Kaskus.us](http://www.kaskus.us) (local online forum), [Detik.com](http://www.detik.com) (local news portal), [Wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) (online encyclopedia).

³⁶ -, *Pemanfaatan Media Baru dan Tantangan Kebebasan Berekspressi di Indonesia*, <http://ictwatch.com/internetsehat/2009/12/09/tren-pemanfaatan-media-baru-internet-dan-tantangan-atas-praktek-kebebasan-berekspressi-di-indonesia/>

³⁷ Diolah dari data sekunder yang ada di Depkominfo, *Renstra Kominfo 2010-2014*

Tampak dari data di atas, setidaknya ada 3 (tiga) situs utama yang dapat memfasilitas pengguna Internet di Indonesia untuk berekspresi kepada publik dan saling bertukar informasi, yaitu situs jejaring social Facebook dan situs layanan blog Blogger.com dan Wordpress.com. Dengan demikian, meski kebebasan berekspresi tumbuh baik di perkotaan dengan menggunakan media internet, namun gap yang besar masih terjadi antara desa dan kota karena ketidaksiapan infrastruktur pendukung.

Berdasarkan hasil survey online yang dilakukan oleh ICT Watch pada Oktober 2008, blog dipilih oleh 53% responden sebagai media informasi yang paling bisa mendukung kebebasan berekspresi di Indonesia. Urutan kedua, 24% responden memilih mailing-list. Survey tersebut diikuti lebih dari 11600 responden, yang bertujuan untuk memetakan persepsi responden terhadap pemanfaatan media bagi kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Media yang dimaksud di sini adalah dari SMS, cetak, elektronik maupun media berbasis Internet.³⁸

Blog, bersama dengan online forum dan mailing-list, diyakini oleh responden sebagai tiga media informasi yang paling tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Dan lagi-lagi blog adalah media informasi yang menurut responden paling tidak perlu diawasi oleh pemerintah. Saat survei di atas dilakukan, penggunaan sosial *networking* seperti Facebook dan micro-blogging semisal Twitter

³⁸ Ibid

baru mulai menggeliat. Kini, berdasarkan Checkfacebook.com per 8 November 2009, saat ini pengguna Facebook dari Indonesia berjumlah lebih dari 11,7 juta account, dengan 58% pria dan 42% wanita. Dari sisi usia, terbanyak adalah dari 18-24 tahun yaitu 40%, kemudian disusul 25,5% berusia 25-34 tahun dan 21% berusia 14-17 tahun, 8,5% berusia 35-44%. Facebooker, kini mengambil peranan yang signifikan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.³⁹

Inti dari kebebasan informasi itu sendiri yaitu hak untuk tahu (*the right to know*) dimana masyarakat memiliki hak untuk tahu terhadap keputusan-keputusan penting yang menyangkut hidupnya.⁴⁰ Dalam kebebasan ini, media massa seperti cetak dan elektronik memiliki keleluasaan dalam memaksimalkan fungsi kontrolnya terhadap tegaknya proses demokrasi secara ideal. Bertanggung jawab tidak saja terhadap kesadaran partisipatif masyarakat terhadap jalannya pemilihan umum, tetapi juga memberikan informasi yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin berkualitas baik dari sisi profesionalisme dan moral.⁴¹

Dalam studi SSLN di Inggris ditemui bahwa meski media massa di sana cenderung bebas yang terlihat dari beragamnya konten

³⁹ Ibid

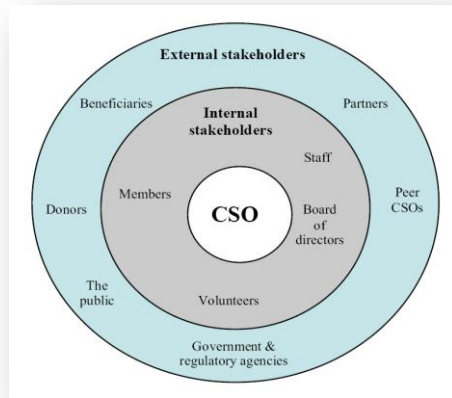
⁴⁰ Armstrong Sembiring, *Apa Benar Kebebasan di Indonesia Berlebihan?* 3 Maret 2010, <http://politik.kompasiana.com/2010/03/13/apa-benar-kebebasan-di-indonesia-berlebihan/>

⁴¹ *Media massa dan regulasi*, http://ediscetak.solopos.com/zindex_menu.asp?kodehalaman=m10&id=69845

media (media dewasa, politik, bisnis, olahraga, dll)⁴², namun ternyata secara nasional ada pengendalian issues yang akan dikeluarkan dan perlu dikawal melalui sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh sekretariat Perdana Menteri; sehingga kepentingan dan keamanan nasional Inggris tetap terjaga sesuai perencanaan.⁴³

Kebebasan Berkumpul

Ada beberapa sub indikator terkait dengan kebebasan berkumpul, yaitu jumlah dan jenis organisasi politik dan organisasi non pemerintah (NGO), dan asosiasi profesi. Dalam usaha membangun pilar



Gambar 3 Stakeholder CSO

demokrasi sebagai prasyarat tumbuhnya masyarakat madani, Indonesia cukup toleran dengan memberi peluang munculnya berbagai partai politik sebagai wahana berkumpul. Pada pemilu 2009 ada 38 parpol peserta. Meskipun akhirnya tidak semua masuk ambang batas (*electoral treshold*). Meski hal ini dianggap pula

⁴² Diperoleh dari pencermatan jenis konten media di toko-toko buku maupun di pedagang pinggir jalan saat *free program SSLN*

⁴³ Diperoleh informasi ini dari penjelasan pimpinan *Crisis Management Centre* yang merupakan salah satu unit di bawah MOD (Ministry of Defense) ketika menjelaskan salah satu *business process* mereka.

sebagai terlalu banyak. Jumlah parpol yang terlalu banyak, menyebabkan tidak mudah membedakan mana politisi dan mana pula yang sekadar ikut-ikutan berpolitik. Hal ini disebabkan pimpinan parpol mengalami kesulitan mencari orang yang mau dijadikan pengurus dan calon anggota legislatif. Alhasil saat ini saat banyak pengurus parpol dan caleg sama sekali tak paham berbagai isu-isu politik.⁴⁴ Hal ini menunjukkan kualitas masyarakat dalam berpolitik masih perlu ditingkatkan.

Tabel 7 Skor variabel CS Indonesia dalam HDI

Category I	Civil Society, Public Information and Media	60 Weak
I-1	<u>Civil Society Organizations</u>	69 Weak
I-2	<u>Media</u>	58 Very Weak
I-3	<u>Public Access to Information</u>	52 Very Weak

Dalam kebebasan bersyarikat atau berkumpul tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini organisasi-organisasi *civil society* (CSO- *Civil society* Organization) memegang peranan yang sangat penting. CSO berperan dalam layanan yang esensial, memberikan pendampingan kelompok pinggiran dan juga pertimbangan pada kebijakan publik⁴⁵. Namun demikian ada berbagai kasus yang

⁴⁴ *Parpol Gurem pun Terancam*, <http://mikekono.wordpress.com/2009/02/16/parpol-gurem-pun-terancam/>

⁴⁵ *Civil Society Accountability: Principles and Practice A toolkit for civil society Organisations*, 2009, Commonwealth Foundation

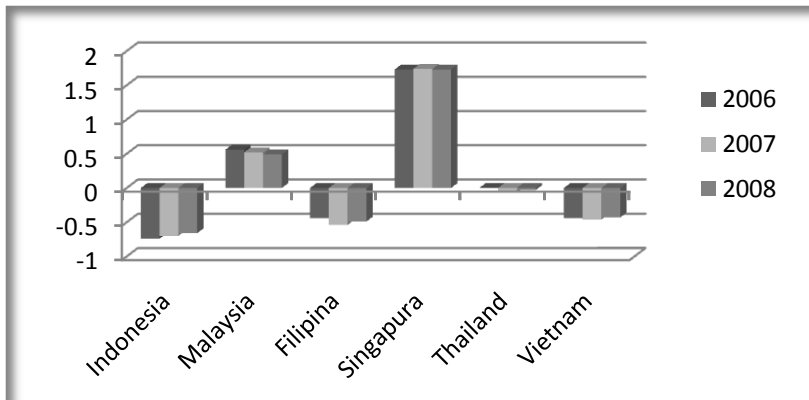
menunjukkan ketidakharmonisan antara CSO, pemerintah, penyandang dana, dan masyarakat sendiri terkait sumber pendanaan, dampak aktivitas, dan kejelasan tujuan organisasi. Akuntabilitas CSO menjadi ukuran untuk peran sertanya dalam membangun masyarakat⁴⁶. Gambar berikut menunjukkan stakeholder CSO yang perlu diperhatikan. CSO yang aktif dalam membangun hubungan dengan stakeholder akan dapat secara signifikan memberikan kontribusi pada implementasi *civil society*. Rendahnya akuntabilitas CSO menjadi penghalang bagi pencapaian masyarakat madani.⁴⁷ Hasil ini sesuai dengan laporan dari Global Integrity Report tahun 2009 dimana untuk CSOs memiliki score rendah dalam integritasnya.⁴⁸

⁴⁶ Pentingnya CSO di Inggris terlihat pada penjelasan dari (1) salah satu staf FCO (Foreign and Commonwealth Office) yang menjelaskan bahwa kelompok-kelompok pecinta olah raga didorong dan difasilitasi untuk terjadinya kesepakatan di masyarakat tentang pentingnya non-diskriminasi, (2) dari staff Northern Ireland Office yang menjelaskan bagaimana peran CSO saat proses referendum penentuan penyatuan Irlandia Utara dengan Inggris termasuk kaitannya dengan minoritas Katolik, dan (3) Adanya demonstrasi dari CSO yang tertib di tempat yang telah disediakan terkait tumpahnya minyak di lautan oleh BP (British Petroleum, Peperangan di India, dll), selain juga adanya pesta kemenangan team England dalam 16 besar World Cup 2010.

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ <http://report.globalintegrity.org/indonesia/2009/scorecard/>

Kebebasan dari Diskriminasi



Gambar 4 Tingkat Layanan Keadilan Hukum atau Penegakan Hukum

Untuk dapat mengetahui tingkat kebebasan dari diskriminasi dapat dilihat pada tingkat layanan keadilan hukum atau penegakan hukum. Dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, Indonesia menduduki posisi terendah (-0.66 dari maksimum +2.5 pada tahun 2008)⁴⁹.

Penegakan hukum yang rendah ini juga dipicu oleh karena transisi demokrasi di Indonesia. Hal ini menyebabkan stabilitas politik dan tingkat kekerasan yang relatif tinggi. Dibandingkan negara ASEAN lain stabilitas dan tingkat kekerasan Indonesia memang lebih tinggi meski secara kuantitatif terjadi penurunan pada tahun 2008 sejak tahun 2006⁵⁰. Beberapa kasus diskriminasi dapat

⁴⁹ Kementerian Negara Ristek, *Indikator Ekonomi Berbasis Pengetahuan Indonesia 2009*

⁵⁰ Ibid

dilihat pada kasus perseteruan perebutan tanah, pengusuran warga, korban masalah perburuhan, dll.

Masukan untuk Pengambilan Kebijakan

Tabel 8 Jenis-jenis Problem Kemasyarakatan di Indonesia Tahun 2009

NO	JENIS PMKS	JUMLAH	NO	JENIS PMKS	JUMLAH
1.	Anak Balita Terlantar	1.186.941	12.	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	135.140
2.	Anak Terlantar	3.176.462	13.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	49.989
3.	Anak Nakal	155.444	14.	Keluarga Fakir Miskin	17.291.448
4.	Anak Jalanan	85.013	15.	Keluarga Tinggal di Rumah Tak Layak Huni	5.880.499
5.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.263.449	16.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	453.542
6.	Korban Tindak Kekerasan	123.738	17.	Komunitas Adat Terpencil	501.283
7.	Lanjut Usia Terlantar	2.994.330	18.	Korban Bencana Alam	1.917.308
8.	Penyandang Cacat	1.541.942	19.	Korban Bencan Sosial	335.992
9.	Tuna Susila	71.657	20.	Pekerja Migran Terlantar	118.526
10.	Pengemis	33.041	21.	Orang dengan HIV/AIDS	19.834
11.	Gelandangan	55.740	22.	Keluarga Rentan	1.247.110

Sumber: Pusdatin Kesos, Kemensos, 2009

Masukan dalam pengambilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik. Ukuran stabilitas politik dapat digunakan *Political Instability Index* yang menunjukkan tingkat ancaman pemerintah oleh protes sosial. Untuk indek ini Indonesia berada pada posisi 52 dari 165 negara dengan skor 6.8 tahun 2009. Suatu prestasi peningkatan yang jauh lebih baik dibanding skor

tahun 2007 sebesar 3.8; meski tetap berada pada posisi negara berisiko tinggi dalam kestabilan politik.⁵¹ Dari data pendukung *civil society* (tabel 4), yang diperoleh dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan masih rendah adalah karena masih tingginya berbagai problem kemasyarakatan di Indonesia.

Di Era Reformasi, partisipasi diberi makna sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang seluas-luasnya baik dalam proses pengambilan keputusan dan monitoring kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Berbagai peraturan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara substantive belum mengatur bagaimana partisipasi masyarakat itu dilaksanakan. Pelibatan masyarakat dalam Proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur secara bertahap sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tiga kendala yang dihadapi pemerintah untuk melibatkan

⁵¹ Social unrest,

http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads

masyarakat dalam kebijakan pembangunan yaitu; (1) instrumen hukum tidak mengatur secara eksplisit bagaimana, dimana dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik; (2) banyak LSM-LSM dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di berbagai bidang memiliki keterbatasan dalam membawa aspirasi rakyat; (3) banyaknya organisasi kemasyarakatan dan LSM di era reformasi menyulitkan untuk menentukan organisasi kemasyarakatan mana yang dapat dianggap mewakili aspirasi masyarakat.

Kesadaran/ Penghargaan pada Hukum

Tingkat kesadaran hukum di Indonesia, salah satunya, dapat dilihat pada indeks kejahatan terutama kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Secara umum, dari data di Interpol⁵². Indeks kejahatan terjadi peningkatan dari 58.857 pada tahun 2005 menjadi 64.946 pada tahun 2006. Dalam hal ini, pembicaraan tentang aturan maka akan terkait dengan akuntabilitas. Untuk menyatakan *good governance*, akuntabilitas perlu dimunculkan tidak hanya pada pemerintahan tetapi juga pada masyarakat.⁵³ Akuntabilitas masyarakat terhadap aturan dan hukum menjadi satu indikator dalam pengukuran HDI (*Human Development Index* untuk indikator

⁵² Diambil dari <http://www.interpol.go.id/interpol/transnational-crime.php?read=16>

⁵³ Goran Hyden, Julius Court and Ken Mease (2003) *Civil Society And Governance In 16 Developing Countries*, World Governance Survey Discussion Paper, July 2003

*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime, 2000).*⁵⁴

Tingkat akuntabilitas Indonesia tergambar pada nilai CPI (*Corruption Perception Index*). Skor Indonesia dalam CPI 2009 adalah 2,8. Skor ini dapat dibaca bahwa Indonesia masih dipandang

Tabel 9 Posisi Indonesia di Dunia pada Aspek CS



The table below shows the most recent World Democracy Audit scores and rankings achieved by this country. Lower scores are preferable

Topics	Range	Ranking
World Democracy Audit overall ranking	1-150	66
Political Rights	1-7	2
Civil Liberties	1-7	3
Press Freedom	0-150	77
Corruption	0-149	89

rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat/ analis negara. Skor Indonesia yang sangat rendah menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil dan komitmen pemerintah terhadap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik harus dipertanyakan. Ini sangat memprihatinkan apalagi

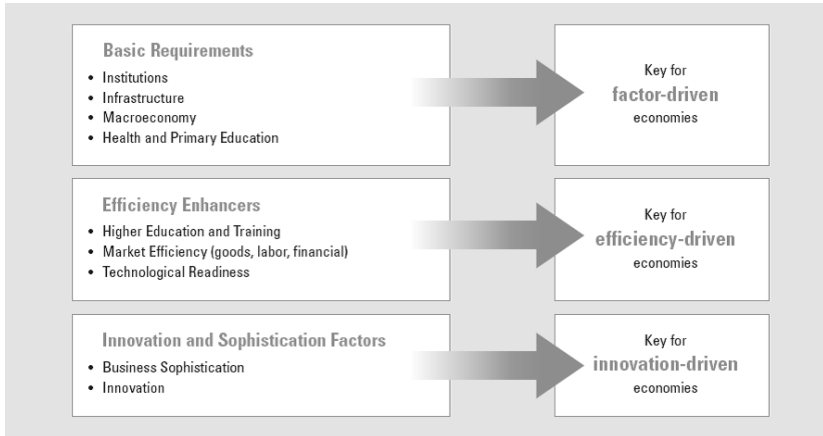
⁵⁴ *Human Development Report 2009 Overcoming barriers: Human mobility and development*, United Nations Development Programme (UNDP)

bila skor Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,5), dan Thailand (3,3). Pada CPI 2008, Indonesia mendapat skor 2,6. Kenaikan sebesar 0,2 tersebut tidak perlu dilihat sebagai suatu prestasi yang harus dibangga-banggakan karena skor 2,8 masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang dipersepsikan korup dan perubahan skor 0,2 tidak terlalu signifikan⁵⁵.

Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal mengalami degradasi. Kondisi tersebut, antara lain, disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan pada masa lalu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat. Kurang berperannya pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) juga menyebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan mempunyai materi yang saling tumpang tindih satu sama lain serta masih adanya peraturan perundang-undangan yang kurang mencerminkan keadilan. Hal tersebut juga diikuti dengan tindakan pembatasan keterlibatan kekuasaan rakyat oleh pemerintah untuk ikut berperan serta secara aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan permasalahan dan sekaligus menjadi tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan hukum.

⁵⁵ Transparency International Corruption Perceptions Index 2009

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa *civil society* yang baik akan dapat mendorong pada pengembangan, pemanfaatan, dan



Gambar 5 Faktor Pengaruh pada Pemajuan IPTEK untuk Daya Saing

pemajuan IPTEK. Untuk melihat pengaruh peningkatan *civil society* terhadap IPTEK akan dilakukan dengan memperhatikan konsep Hyden tentang indikator CS. Sebagaimana telah disebutkan di landasan teori bahwa CS merupakan ruang di luar pemerintah, pelaku bisnis, dan keluarga. Integrasi ketiganya dalam mencapai tujuan bersama dapat dipastikan akan terbentuk CS yang baik⁵⁶.

Di sisi lain, hasil dari *Global Competitiveness Index*, Indonesia merupakan negara yang berada pada posisi teknologi sebagai *Efficiency Enhancers* sehingga ada tiga faktor yang perlu

⁵⁶ Gambaran integrasi ketiga elemen ini di Inggris dapat dilihat pada saat kunjungan ke pameran industri strategis yang di selenggarakan oleh UKTI (United Kingdom Trade and Investment) yang diikuti oleh berbagai *private industries*, dan tetap memberi peluang oerorganisasi pro lingkungan berpartisipasi di dalamnya.

diperhatikan, yaitu: (1) pendidikan tinggi dan pelatihan, (2) efisiensi pasar (barang, tenaga kerja, dan keuangan), dan kesiapan teknologi. Lihat gambar... Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk peningkatan pemajuan IPTEK⁵⁷ adalah:

- *Research and Development Inputs*
- *Risk Capital and Entrepreneurial Infrastructure*
- *Human Capital Investment*
- *Technology and Science Workforce*
- *Technology Concentration and Dynamism*

Peningkatan faktor-faktor ini yang perlu diperhatikan untuk pemajuan IPTEK dalam kaitannya dengan peningkatan *civil society*.

3. Implikasi Peningkatan Civil society guna Pemajuan IPTEK dalam rangka Ketahanan Nasional

Posisi Indonesia dalam pemanfaatan e-government untuk *pengembangan civil society* yang belum optimal untuk pengembangan *civil society* akan menyebabkan keberanian untuk berkreasi menjadi kurang mendapat ruang di masyarakat. Sehingga hal ini akan menyebabkan penyumbatan ide-ide dan juga secara psikologis, masyarakat akan enggan dalam melakukan inovasi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK. Hal ini dapat dilihat pada

⁵⁷ DeVol, Ross C, 2003, *Technology as an Economic Engine for Southern California*, The Milken Institute, Conference Proceedings, <http://escholarship.org/uc/item/8wv2b0bc>

tingkat *Technology and Science Index*. Rendahnya kemampuan inovasi akan berpengaruh pada rendahnya aktivitas *Research and Development* sebagai salah satu faktor penentu perkembangan IPTEK. IPTEK yang tidak tumbuh dengan baik akan berimplikasi pada produk *engineering* yang dihasilkan juga kurang baik, dan ini akan menyebabkan support pada aktivitas bisnis juga kurang baik (lihat pada tingkat daya saing produk industri Indonesia yang masih rendah)⁵⁸; berarti CS juga tidak berkembang baik.



Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia dengan pertumbuhan pengguna Internet yang signifikan. Hanya saja pembangunan infrastruktur komunikasi di Indonesia masih belum merata sehingga memunculkan terjadinya diskriminasi akses informasi. Kebebasan informasi itu sendiri untuk tahu (*the right to know*) keputusan-keputusan penting yang menyangkut hidupnya menjadi berkurang. Diskriminasi lain ditemui selain dalam aspek pembangunan daerah adalah dalam penegakan keadilan di masyarakat. Implikasi dari hal ini adalah pertumbuhan dan ketersediaan sumber daya manusia yang memahami IPTEK menjadi

⁵⁸ Salah satunya terlihat dalam struktur neraca perdagangan Indonesia-Inggris yang masih bertumpu pada bahan-bahan industri di sektor hulu. Namun demikian dengan posisi Indonesia yang sangat potensial bagi pasar industri Inggris, struktur ini dapat mulai digeser ke hilir melalui berbagai skema kerjasama. Hal ini teretus saat jamuan makan malam dengan pimpinan UKTI (*United Kingdom Trade and Investment*) saat SSLN.

terbatas. Akses pada pengetahuan baik melalui pendidikan yang baik (lihat pada APK Pendidikan Tinggi tiap daerah) maupun aktivitas pendidikan non formal juga terbatas. Hal ini menjadikan Human Capital Investment tidak ditangani secara adil dan baik. Keterbatasan SDM ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan IPTEK menjadi tidak berkembang dengan baik.

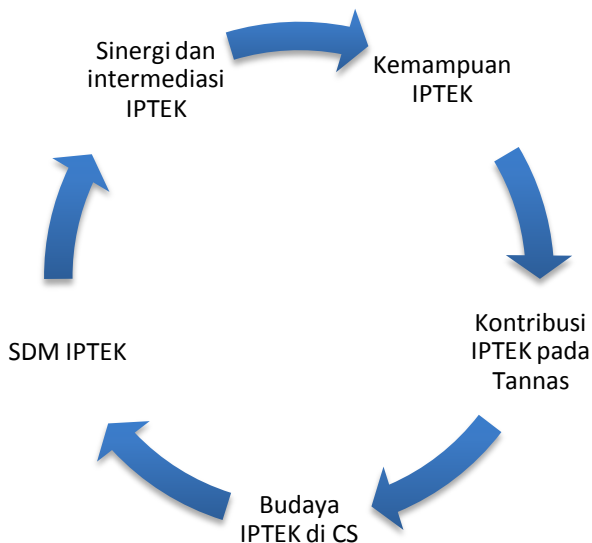


Masukan dalam pengambilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik. Dari data pendukung *civil society* yang diperoleh dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan masih rendah adalah karena masih tingginya berbagai problem kemasyarakatan di Indonesia. Penyediaan infrastruktur, peluang pada pengembangan kewirausahaan, ketersediaan sumber dana menjadi tidak terdukung dengan baik karena masing-masing masih terfokus pada masalah level rendah (kebutuhan primer). Implikasi hal ini adalah tidak tumbuhnya *Risk Capital and Entrepreneurial Infrastructure dan Technology and Science Workforce*. Hal ini yang menjadikan pemajuan IPTEK belum berkembang baik.



Selain itu isu korupsi yang ada di pemerintahan akan menjadi penghalang bagi implementasi *civil society* yang baik. Dari hasil survei tentang indeks persepsi korupsi (*The Corruption Perceptions Index* atau CPI) yang mengukur tingkat kesadaran korupsi sektor publik menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi di bawah. Ini menggambarkan *respect to rules* yang rendah. Setidaknya ada dua pengaruh dari penghargaan pada aturan yang kurang baik, yaitu tingkat kejahatan yang tinggi dan tingkat akuntabilitas yang rendah. Kedua hal ini akan menyebabkan adanya ketidakstabilan sosial dan politik (lihat pada indeks keamanan Indonesia). Implikasinya adalah pada komitmen yang rendah dalam pengembangan IPTEK yang terlihat pada tingkat konsentrasi dan dinamisasi IPTEK; ini yang menjadikan pemajuan IPTEK juga tidak tumbuh dengan baik.





Gambar 6 Siklus Hubungan Peran CS-IPTEK-TANNAS

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun ketahanan nasional. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi (*Techno-Economy Paradigm*), teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (*Resource Based Economy*) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (*Knowledge Based Economy/KBE*). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer

ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing.

4. Permasalahan yang dihadapi

Untuk memperoleh gambaran permasalahan yang dihadapi, data terkait peningkatan *civil society* yang telah dibahas sebelumnya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan persoalan atau akar masalah. Agar lebih jelas dalam identifikasi akar masalah, teknik affinity diagram dipilih untuk menentukan akar masalah. Teknik ini dilakukan dengan cara (1) membuat daftar semua gejala atau permasalahan yang ditemukan, selanjutnya (2) dikelompokkan setiap gejala yang saling kerkesesuaian, dan (3) dianalisis akar masalah (persoalan) pada tiap kelompok permasalahan. Hasil akhir teknik ini adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6 Affinity Diagram untuk Penentuan Akat Masalah dalam Peningkatan Civil Society

No	Gejala/ permasalahan	Akar masalah/ persoalan
1	tingkat densitas sarana komunikasi tinggi namun tidak merata	1. Pembangunan berbagai bidang dan sektor yang belum merata
2	gap/ disparitas akses informasi antar wilayah cukup besar	

3	pemakaian media massa untuk berekspresi belum terkendali	2. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab antara CSO, pemerintah, dan pelaku bisnis	
4	kontrol media masa pada proses demokrasi tidak jelas		
5	organisasi bersyarikat yang sangat beragam dan cenderung tidak solid		
6	ketidak harmonisan peran CSO baik antar CSO maupun dengan pemerintah dan dunia bisnis		
7	tingginya berbagai problem kemasyarakatan		3. Kesadaran hukum dan penghargaan pada keadilan yang masih rendah
8	stabilitas politik dan tingkat kekerasan yang relatif tinggi		
9	penegakan hukum yang rendah		
10	konflik komunal dan sosial tinggi		
11	tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan masih rendah		
12	isu korupsi yang ada di pemerintahan tinggi	4. Ketersediaan, penegakan moral dan etika profesi yang	
13	kejahatan terutama kejahatan		

	kerah putih (<i>white colar crime</i>) relatif tinggi	belum baik
14	korupsi oleh para pelaku bisnis maupun birokrat	
15	tingkat pemanfaatan IT dalam komunikasi (e-government) masih rendah	5. Komitmen akuntabilitas pemerintah belum cukup tinggi
16	komitmen <i>good governance</i> pemerintah masih perlu ditingkatkan	
17	arah dan fokus IPTEK yang bersifat sektoral	6. Sinergi dan intermediasi pemajuan IPTEK antar lembaga belum cukup baik
18	ketidaksiapan infrastruktur pendukung akses informasi dan pengetahuan	

Dari hasil affinity diagram tersebut, persoalan yang terkait dengan peningkatan *civil society* guna pemajuan IPTEK dalam rangka ketahanan nasional adalah:

a. Pembangunan berbagai bidang dan sektor yang belum merata.

Saat ini lebih dari 50% penduduk Indonesia bermukim di wilayah perkotaan. Sementara itu, hampir 70% di antaranya tinggal di desa dan kota-kota kecil. Walaupun estimasi tetap

memperkirakan bahwa proporsi penduduk kota-kota kecil tersebut tetap berada sedikit di bawah angka 70%, namun dengan jumlah dan pertambahan jumlah penduduk wilayah perkotaan yang cukup tinggi, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kota-kota kecil tersebut mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu sekitar 60,2 juta jiwa di tahun 2000, yang akan menjadi sekitar 86,5 juta jiwa di tahun 2010 dan kemudian menjadi 98,6 juta jiwa di tahun 2015. Diperkirakan angka ini akan terus membesar dengan terus berkembangnya jumlah penduduk perkotaan⁵⁹.

**Tabel 7 Jumlah dan Proporsi Penduduk Perkotaan
Indonesia per Tiap Jenis Kota Tahun 1980, 2000, 2010 dan 2015
(dalam juta jiwa)**

Jumlah penduduk	1980		2000		2010		2015	
	juta jiwa	%	juta jiwa	%	juta jiwa	%	juta jiwa	%
	kurang dari 500 ribu	19,191	57.9	60,194	68.5	86,483	68.3	98,607
500 ribu - 1 juta	3,255	9.8	6,171	7.0	6,051	4.8	5,810	4.0
1 - 5	4,742	14.3	10,431	11.9	18,830	14.	17,839	12.4

⁵⁹ M. Amin, Urbanisasi: Indikator Ketidakberhasilan Pemerataan Pembangunan - Pemberdayaan Desa Sebagai Solusi, http://www.gapri.org/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=98

juta						9		
5 - 10 juta	5,984	18.0	0	0.0	0	0.0	5,338	3.7
lebih dari 10 juta	0	0.0	11,065	12.6	15,206	12. 0	16,822	11.6
Total	33,172	100.0	87,861	100. 0	126,57 0	100 .0	144,41 6	100. 0

Sumber data : UN Population Division, 2007

Sesungguhnya permasalahan antara Jawa dan luar Jawa, kota dan desa adalah karena keadilan pembangunan yang belum berjalan dengan baik. Dampak langsung dari hal ini adalah ketersediaan infrastruktur fisik, energi, informasi, organisasi yang terbatas. Ada berbagai akibat yang akan muncul dari pembangunan yang tidak merata seperti ketersediaan SDM yang memahami mengembangkan *civil society* yang baik, SDM yang mendukung pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan industri jasa dan produksi, pertumbuhan pasar penggerak ekonomi yang lamban dan terkonsentrasi pada daerah tertentu.

b. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab antara CSO, pemerintah, dan pelaku bisnis

Keberhasilan peningkatan *civil society* terjadi ketika ada sinergitas antara organisasi penggerak *civil society*, pemerintah,

dan pelaku bisnis. Tidak munculnya sinergi ini akan membawa akibat masing-masing mengembangkan tujuan sendiri-sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan publik secara luas. Munculnya lembaga-lembaga donor yang memiliki kepentingan sendiri, apabila tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat justru akan menyebabkan kepentingan masyarakat menjadi dikalahkan. Beberapa sarana integrasi ketiga pelaku peningkatan *civil society* seperti media elektronik, maupun cetak perlu untuk dimanfaatkan secara bijak dalam rangka peningkatan *civil society* melalui sinergitas.

c. Kesadaran hukum dan penghargaan pada keadilan yang masih rendah

Kesadaran hukum dan penghargaan pada keadilan diharapkan terjadi tidak hanya pada masyarakat, namun juga pada para pelaku peningkatan *civil society*. Kasus-kasus konflik di masyarakat (meski terkadang merupakan strategi perang asimetris) merupakan indikasi kesadaran hukum yang belum baik. Demonstrasi yang dilakukan oleh para pekerja dalam kasus pelaku bisnis juga merupakan persoalan yang sama. Keadaan yang tidak kondusif karena kesadaran hukum dan penghargaan keadilan yang rendah akan berampak pada ketidakstabilan sosial dan politik dan ini akan berakibat pada rapuhnya sistem sosial pendukung kemajuan *civil society*.

d. Ketersediaan, penegakan moral dan etika profesi yang belum baik

Dalam setiap asosiasi profesi seharusnya telah ada moral dan etika profesi. Hanya saja memang saat ini tidak semua profesi telah memiliki konsep ini secara baik. Dengan adanya etika profesi dan penegakannya, peran para pelaku penegakan *civil socceity* akan menjadi lebih baik. Sumber daya yang dimiliki untuk membangun *civil society* yang lebih baik dapat dikelola secara profesional dengan menghilangkan terjadinya penyimpangan dalam berbagai bentuk termasuk KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

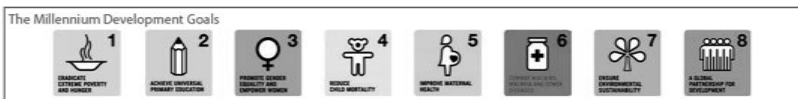
e. Komitmen akuntabilitas pemerintah belum cukup tinggi

Pembangunan dan demokrasi merupakan pendukung berjalannya *civil society*. Dan untuk itu dibutuhkan akuntabilitas dan responsibilitas semua yang menjalankan demokrasi dan pembangunan yaitu para pelaku *civil society*. Akuntabilitas ini perlu adanya pelibatan masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan menjadi yang utama dalam mendukung keberhasilan peningkatan *civil society*. Termasuk dalam peningkatan *civil society* ini adalah akuntabilitas kebijakan, strategi, dan kinerja pemanfaatan bantuan kepada masyarakat dan parlemen di negara donor dan penerima bantuan dari para pengelola organisasi *civil society*. Orientasi yang tidak simetris

dan tidak seimbang dalam mengelola akuntabilitas akan menyebabkan ketidakpastian, instabilitas dan tidak berkelanjutan dalam pengembangan masyarakat madani.

f. Sinergi dan intermediasi pemajuan IPTEK antar lembaga belum cukup baik

Kebijakan bidang pendidikan, industri, dan iptek yang belum terintegrasi dapat menyebabkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna yaitu industri. Disamping itu kebijakan fiskal juga dirasakan belum kondusif bagi pengembangan kemampuan iptek. Mekanisme intermediasi iptek diharapkan dapat menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna. Beberapa prasyarat adalah tertatanya infrastruktur iptek, antara lain institusi yang mengolah dan menterjemahkan hasil pengembangan iptek menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi, efektifitas sistem komunikasi antara lembaga litbang dan pihak industri termasuk dalam pemberdayaan industri kecil menengah berbasis teknologi.



BAB IV

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Umum

Bab ini membahas lingkungan strategis terkait dengan kondisi global dan internasional, regional, dan nasional. Pembahasan lingkungan strategis ini diharapkan dapat mengerucut menjadi analisis peluang dan kendala sebagai *external environment*. Hasil analisis ini yang akan digunakan sebagai konsideran atau pertimbangan ketika menyusun kebijakan, strategi, dan upaya di Bab V, setelah melihat akar masalah atau persoalan yang telah dibahas di Bab III.

2. Perkembangan Internasional/ Global

Pergeseran pengaruh Ideologi

Kekuatan IPTEK suatu negara telah mendorong negara tersebut menjadi adidaya dengan kekuatan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Keadaan ini telah menyebabkan adanya kecenderungan dan dominasi negara adidaya (yang memiliki ekonomi mapan dengan didasari ideologi yang kadang berbeda) untuk memaksakan kehendak sebagai bagian proses penguasaan atas negara lain dalam berbagai aspek. Negara-negara yang kuat cenderung menerapkan pandangan-pandangan politik serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya kepada negara lain melalui

proses penyertaan modal/ kapital, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pasar produk industri. Hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan sebagai sebuah ancaman baru dalam rangka mempertahankan kedaulatan, kepribadian dan kemandirian bangsa. Kekuatan ideologi negara adidaya melalui kekuatan ekonomi yang dimiliki ini terkadang menyebabkan terjadinya ketegangan antar negara (antara negara kaya dan miskin) yang dalam hal ini dikenal adanya polarisasi negara menjadi Utara-Selatan maupun Selatan-Selatan.

Dampak kekuatan globalisasi dan penetrasi ideologi asing ini akan terindikasi pada 4F (*Food, Fashion, Fun, and Fund*). Makanan-makanan (*food*) khas bangsa Indonesia mulai tidak dikenali lagi oleh generasi muda. Makanan yang disukai adalah makanan khas dari negara asing yang lebih mapan secara ekonomi. Demikian juga dengan pakaian, tata ruang lingkungan, asesori kehidupan bermasyarakat (*fashion*) juga merujuk pada apa yang ada di negara asing. Hiburan-hiburan melalui berbagai aktivitas baik dalam ruang (TV, Film, dll.) maupun luar ruang (olah raga, travelling, dll.) juga akan mencontoh aktivitas dari negara yang kuat ekonominya. Pendanaan untuk tegaknya bangsa ini juga banyak tergantung pada grant, loan, dan pendanaan lain dengan skema yang disodorkan oleh negara kuat. Ini semua merupakan kondisi dan gambaran kekuatan ideologi asing dalam melakukan usaha penetrasi terhadap ideologi

Pancasila.

Isu-isu Global Penting

Hikmah terpenting dari krisis finansial dan ekonomi global yang melanda dunia dua tahun terakhir ini adalah mulai munculnya kesadaran akan keperluan mereformasi lembaga-lembaga keuangan global dan regional. Negara-negara maju yang tergabung dalam G-8, menyadari bahwa untuk menanggulangi krisis ekonomi global, tidak bisa lagi ditangani oleh mereka sendiri, karena itu diperlukan partisipasi negara-negara emerging economies. Sebagai negara dengan GNP (Gross National Products) menurut ukuran *Purchasing Power Parity* (PPP) ke-16 terbesar di dunia, ekonomi yang sangat dinamis, posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan, Indonesia telah diundang menjadi anggota G-20 Summit.

Terjemahan praktis dari perkembangan di atas adalah surutnya peranan G-8 yang merupakan kelompok eksklusif negara-negara maju. Peran mengatur kebijakan ekonomi dunia mulai digantikan oleh G-20, yang merupakan kelompok yang melibatkan baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Semakin pentingnya peranan G-20 tidak terlepas dari fakta bahwa kehadiran negara-negara berkembang seperti Indonesia telah membentuk perspektif yang lebih tepat dalam melihat masalah dan membangun solusinya. G-20 yang diselenggarakan di London telah membahas 4 agenda dalam

upaya mengatasi krisis global. Agenda pertama adalah kebijakan stimulus fiskal untuk pemulihan ekonomi dunia minimal 2% dari PDB masing-masing negara pada tahun 2009 dan 2010. Agenda kedua tentang regulasi dan supervisi sektor keuangan yang standar dan uniform. Agenda ketiga adalah reformasi IMF dengan restrukturisasi quota. Dan agenda keempat tentang isu proteksionisme.

Selain itu perlu juga dipertimbangkan tujuan PBB terkait dengan MDGs. *Millenium Development Goals* (disingkat MDGs) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tujuan Pembangunan Milenium (TPM). Tujuan Pembangunan Milenium merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KT) Milenium PB bulan September 2000 silam. Majelis Umum PB kemudian melegalkannya ke dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 Tentang Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/RES/55/2. *United Nations Millennium Declaration*)⁶⁰.

Secara mendasar, isu/ fenomena global yang akan terus mewarnai, mempengaruhi, dan memberi dampak terhadap

⁶⁰ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007, 2007*

lingkungan strategis saat ini adalah⁶¹:

Fluktuasi Harga Minyak Dunia

Ditengah-tengah kondisi semakin terbatasnya cadangan minyak dunia, dihadapkan dengan semakin tingginya kebutuhan akan sumber daya strategis tersebut, kecenderungan meningkatnya harga minyak dunia tidak akan dapat dihindari. Ke depan: upaya kerjasama menstabilkan harga semakin besar, upaya mengurangi ketergantungan pada sumberdaya minyak (dan gas bumi) semakin meningkat, individualisme mengamankan sumberdaya strategis semakin intens.

Perubahan Iklim

Tanda- tanda perubahan iklim akibat dampak pemanasan global telah mulai terlihat. Walaupun kesadaran internasional tetapi komitmen menerima tanggungjawab masih rendah, seiring dengan masih lemahnya instrumen kerjasama dan pengawasan. Kedepan: upaya kerjasama untuk mengurangi laju dan memitigasi dampak pemanasan global semakin meningkat, tetapi secara bersamaan jalannya pembangunan negara berkembang menjadi terbatas.

Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi yang dialami negara-negara maju membawa dampak yang tidak dapat dihindari negara-negara berkembang.

⁶¹ Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Analisa Lingkungan Strategis, *Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2008*, Januari 2008

Interkoneksi perekonomian internasional menyebabkan krisis ekonomi semakin rawan terjadi. Kedepan : menguatnya transparansi dan pengawasan ekonomi dan keuangan internasional, namun pada saat yang bersamaan juga meningkatkan tekanan-tekanan terhadap perekonomian negara berkembang.

Dominasi Negara-Negara Maju

Perkembangan dunia masih banyak dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara *major powers* dalam mengamankan kepentingan nasional masing-masing kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ke depan:

- Dinamika politik dan keamanan internasional, masih bergantung pada keseriusan negara-negara besar dalam memelihara perdamaian dan stabilitas internasional, dan mengurangi *adventurisme* politik luar negeri yang mendorong instabilitas dan gejolak di berbagai kawasan;
- Upaya reformasi dan restrukturisasi PBB semakin intens karena merupakan kepentingan mendesak dalam menjamin keadilan dan kepentingan negara-negara berkembang, tetapi akan banyak bergantung pada kerelaan dan komitmen negara-negara besar dalam mengurangi kekuasaannya dalam organisasi internasional tersebut;

- Meningkatnya upaya peningkatan kekuatan militer oleh seluruh negara di dunia dalam rangka menjamin kelangsungan hidup dengan memperkuat kemampuan daya tangkal menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional.

Perubahan Kekuatan Dunia

Siklus peta kekuatan dunia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dengan melemahnya kedigdayaan ekonomi AS, meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Cina dan India, serta menguatnya *leverage* Rusia, perimbangan konstelasi global tengah terjadi. Kedepan : persaingan mempertahankan pengaruh global dan regional semakin mengemuka antara negara-negara besar, sehingga adaptasi terhadap pergeseran kutub interaksi internasional semakin penting.

3. Perkembangan Regional

Dalam konteks stabilitas keamanan regional, sejumlah isu keamanan bersumber pada klaim teritorial, keamanan jalur pelayaran dan perdagangan, terorisme, perompakan, bajak laut dan penyelundupan. Pembangunan kepercayaan dan peningkatan kerjasama di kawasan dalam mengatasi masalah-masalah ini terus dilaksanakan. Secara ideologi, negara-negara di sekitar wilayah Indonesia relatif berbeda. Meski Australia, Singapura, Philipina memiliki ideologi yang cenderung liberal sekuler,

namun karena kepentingan yang tidak selalu sama maka negara-negara tersebut tidak selalu sejalan. Demikian juga antara Brunei dan Malaysia serta beberapa negara lain di kawasan Asia Pasifik. Faktor geopolitik menjadi penentu hubungan regional negara-negara ini. Sebagai contoh, pergeseran kepemimpinan di Australia selalu membawa pengaruh pada intensitas hubungan dengan Indonesia. Beberapa kasus tertentu dapat menjadi pemicu ketegangan diplomatik Australia- Indonesia.

Wilayah regional dengan kedudukan geografis yang memiliki keluasan dan keadaan demografis yang berbeda-beda berpegaruh pada cara pandang yang kadang saling berbenturan dalam interaksi antara negara. Terlebih jika dilihat bahwa secara regional, Indonesia berada pada posisi silang sehingga akan menjadi wilayah pertemuan arus ideologi di sekitarnya yang juga dipengaruhi pertemuan arus ideologi liberalisme dan sosialisme dalam berbagai variannya. Dari sisi ekonomi, wilayah regional Asia Pasifik memiliki potensi pasar yang sangat besar. Penguatan daya saing regional akan sangat erat kaitannya dengan penguasaan pasar di wilayah regional ini. Prediksi-prediksi kekuatan ekonomi masa depan menunjukkan akan terjadinya penguatan ekonomi regional di Asia (lihat kedudukan China saat ini dalam sistem ekonomi dunia). Ekspansi teknologi sebagai salah satu cara untuk melakukan penetrasi penguasaan ekonomi di wilayah Asia Tenggara (melalui proses transfer teknologi,

investasi industri berbasis teknologi, pertukaran pendidikan, dll)⁶² juga berimplikasi pada masuknya ideologi asing di Indonesia.

Kondisi regional yang perlu diperhatikan adalah perubahan kekuatan di wilayah Asia Pasifik dimana Asia Tenggara menjadi wilayah yang berkembang cepat dengan tidak mengesampingkan China dan India. Perkembangan ekonomi China dengan pertumbuhan ekonomi di atas 9% menjadi kekuatan baru dunia yang diperhitungkan.⁶³

Pengaruh India di kawasan Asia Selatan meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dan keberhasilan pembangunan militer negara tersebut dalam 5 tahun terakhir. Pengaruh India memungkinkan negara tersebut berupaya meningkatkan posisi tawar khususnya terhadap Pakistan dan China. Di sisi lain, kondisi Pakistan tetap diwarnai gejolak politik dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah Pakistan lebih banyak memfokuskan pada masalah dalam negeri, dibandingkan mengkhawatirkan masalah India. Menguatnya India sebagai kekuatan regional menyebabkan arah kebijakan India pada masa mendatang perlu dicermati, terutama berkaitan dengan kedekatannya dengan dan posisi yang

⁶² Lihat pada *Japanese Science and Technology Indicators 2009*, NISTEP, MEXT, 2010

⁶³ Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Analisa Lingkungan Strategis, *Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2008*, Januari 2008

bersaing dengan Cina⁶⁴.

4. Perkembangan Nasional

Aspek Demografi

Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa yang tinggal tersebar dan tidak merata di seluruh wilayah negara. Sebagian besar berada di pusat-pusat pemerintahan atau pusat-pusat industri dan perdagangan (perkotaan), sebagian kecil di daerah terpencil, dan ada yang tinggal di sekitar perbatasan antar negara. Perbedaan yang cukup menyolok terjadi pada daerah-daerah tersebut. Di pusat-pusat pemerintahan, industri dan perdagangan memiliki fasilitas kehidupan yang sangat baik, sedangkan di daerah perbatasan negara cenderung kurang diperhatikan selain juga sulit dilintasi atau dijangkau. Rendahnya perhatian pada wilayah ini akan menyebabkan munculnya persoalan frontier.

Dari sisi ketersediaan SDM yang berkualitas, Indonesia juga masih terbatas. Kasus-kasus brain drain pada para ahli yang dimiliki menjadi isu cukup penting dalam pemajuan IPTEK. Pengelolaan SDM Iptek kurang dilakukan dengan baik dan kurang terencana karena tidak memenuhi standar dalam aspek rekrutmen dan pendidikan secara profesional. Kurangnya ketersediaan SDM profesional yang memiliki jiwa

⁶⁴ Ibid

"*entrepreneurship*" (kewirausahaan) sebagai pendukung pertumbuhan industri yang berorientasi pasar, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing nasional yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ini beberapa situasi terkait dengan ketersediaan SDM.

Aspek Geografi

Pada era kemerdekaan tersebut, integrasi antar komponen bangsa sangatlah kuat satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya ancaman dari luar saat ini mencakup ancaman terhadap kepentingan-kepentingan nasional, seperti aspek ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan bangsa dan negara Indonesia. Ketidakmampuan mengidentifikasi ancaman ini menyebabkan munculnya etnosentrisme. Gejala etnosentrisme yang juga bibit etnonasionalisme terjadi ketika etnis lokal dianggap lebih baik dari etnis lain. Hal itu akan menurunkan kondisi integrasi nasional. Undang-undang tentang otonomi daerah yang belum didukung orientasi pengelolaan otonomi perlu diwaspadai terhadap terjadinya etnonasionalisme. Selain itu, perubahan lingkungan global yang mempengaruhi kehidupan dan tidak dirasakan sebagai ancaman oleh masyarakat berdampak justru semakin memudarnya integrasi nasional.

Secara nasional, Indonesia mengalami krisis tata ruang karena pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih

sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta tidak memerhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Selain itu, sering terjadi konflik pemanfaatan ruang antarsektor, contohnya konflik antara kehutanan dan pertambangan.

Aspek Sumber Kekayaan Alam⁶⁵

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Pengelolaan sumber daya alam masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang menyebabkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis, selain karena kemampuan iptek yang tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan

⁶⁵ Asian Development Bank, *Indonesia: Country Environment Analysis*, August 2005

atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memerhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan.

Aspek Ideologi

Dalam aspek ideologi, pada beberapa waktu terakhir muncul kembali pemikiran kiri dalam ideologi di Indonesia dengan semangat tuntutan pada kebebasan berkumpul dan berekspresi. Kasus seperti pemutarbalikan fakta-fakta peristiwa S/PKI, membentuk partai politik aliran kiri ataupun menyusup menjadi anggota Parpol lain untuk menjadi anggota DPR dan DPRD sangat mungkin terjadi. Penurunan kesadaran tentang Pancasila juga terlihat dari digulirnya wacana pemerintahan federal maupun pemerintahan berbasis agama.

Aspek Politik

Pada aspek politik, sangat disadari bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya cenderung semakin meningkat. Namun demikian, dalam perkembangan lain, tuntutan pemekaran daerah, konflik antar kelompok dalam Pilkada, konflik antar daerah yang kadang berujung pada aksi-

kasi kekerasan masih mewarnai dinamika politik lokal. Aktivitas partai-partai politik, seperti konsolidasi internal partai, pertemuan-pertemuan antar partai, baik partai besar maupun partai-partai menengah dan kecil. Sementara di tingkat daerah, hubungan antar partai ditandai dengan adanya koalisi antar partai dalam Pilkada. Dilihat dari segi komunikasi politik, hal ini akan dapat saling memberikan pemahaman.

Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi telah menjadi fokus tersendiri di Indonesia. Upaya-upaya peningkatan kinerja perekonomian diusahakan untuk peningkatan daya saing produk, perbaikan birokrasi, jaminan hukum dan keamanan yang lebih baik, danantisipasi faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar uang dan harga minyak dunia.

Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2010 bahwa *Outlook* perekonomian Indonesia pada tahun 2010 masih baik. Pertumbuhan PDB pada tahun 2010 diproyeksikan akan banyak dipengaruhi oleh pemulihan investasi dan ekspor, dengan tetap didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Selain itu, Program pembangunan pemerintah di 2010 mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%. Dari sisi konsumsi, pertumbuhan investasi dan ekspor menjadi andalan dengan didukung konsumsi rumah

tangga dan pemerintah. Dari sisi produksi, pertumbuhan sektor Transportasi, Konstruksi, dan industri diharapkan terus meningkat, serta Sektor Pertanian dapat dipertahankan pertumbuhannya. Proyeksi indikator ekonomi makro 2010-2014 adalah nilai tukar rupiah diperkirakan stabil di bawah Rp10.000/US\$, Inflasi terkendali pada level 5% +1%; SBI 3 bulan berada pada tingkat sekitar 7%; Harga minyak diasumsikan terus meningkat hingga ke US\$85/barel; dan (iv) Produksi minyak mencapai 1.000 MBCD mulai tahun 2013.⁶⁶

Aspek Sosial Budaya

Dalam aspek sosial budaya, aksi unjuk rasa masyarakat cenderung terus menurun. Meskipun demikian angka pengangguran yang masih tinggi, permasalahan buruh yang memicu terjadinya aksi unjuk rasa, dan adanya konflik antar masyarakat, baik disebabkan karena perbedaan prinsip keagamaan maupun permasalahan lain juga pada kadar tertentu telah memicu tindak kekerasan termasuk masalah tanah dan SARA.

Selain itu, secara internal nasional, terjadinya sejumlah kasus konflik dengan berbagai motif dan bentuk perilaku baik dalam lingkup nasional, lingkup daerah, maupun antar warga

⁶⁶ Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Laporan Penyelenggaraan Musrenbangnas RPJMN 2010-2014*, Jakarta, Desember 2009

masyarakat menunjukkan betapa besar bahaya yang dihadapi oleh bangsa dan negara dan betapa jauh akibat malapetaka yang harus diderita rakyat. Oleh karena itu kewaspadaan nasional harus ditingkatkan, dengan sejak dini mengupayakan agar peristiwa- peristiwa konflik yang membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat jangan terulang kembali atau paling tidak dapat diminimalisasi⁶⁷.

Aspek Pertahanan dan Keamanan

Situasi keamanan nasional pada dekade terakhir dipenuhi isu tentang terorisme. Selain masih kuatnya isu radikalisme di masyarakat sebagai indikasi adanya potensi ancaman terorisme. Isu *human trafficking*, *illegal logging*, *illegal fishing* juga masih cukup menonjol sebagai bagian masalah keamanan. Walaupun pemerintah telah berupaya melakukan berbagai cara, termasuk dengan menggelar operasi keamanan namun isu tersebut masih cukup menonjol.

5. Peluang dan Kendala Lingkungan Strategi

Untuk pengembangan strategi dan kebijakan yang akan dipilih, peluang dan kendala perlu diperhatikan pada tahap ini.

⁶⁷ Pokja Adhoc TPM – Pjj Bs Kewaspadaan Nasional.(2006) *Buku Panduan Mata Kuliah/ Materi Pokok 2: Manajemen Konflik*. Lemhannas RI. Hlm. 4

Peluang Lingkungan Strategi

Peluang yang ada dapat berasal dari nasional, regional, dan internasional. Geografis Indonesia terletak pada posisi silang yang menguntungkan bagi interaksi antar negara. Berbagai aktivitas baik ekonomi, budaya, akan saling pengaruh mempengaruhi. Didukung dengan letak astronomi pada wilayah tropis, Indonesia memiliki keunggulan pada jenis-jenis keanekaragaman hayati yang berbeda dibanding negara lain. Letak astronomi akan berpengaruh juga pada penempatan satelit komunikasi (meski sampai saat ini belum ada aturan yang disepakati semua pihak tentang pengelolaan angkasa luar). Selain itu, bentuk kepulauan Indonesia menjadikan garis pantai (dan kekayaan laut) yang dimiliki menjadi potensi bagi pengembangan bioteknologi dan sumber pangan.

Secara demografis, Indonesia memiliki penduduk yang banyak. Hal ini menjadi potensi bagi ketersediaan SDM bagi berbagai aktivitas ketika mereka memiliki pemahaman IPTEK yang baik. Penduduk yang banyak juga merupakan potensi pasar bagi berbagai produk industri dan non industri. Saat ini, produk-produk industri asing mengandalkan Indonesia sebagai pasar utama untuk melakukan petetrasi produk dan jasa yang dihasilkan. Kekayaan alam baik geologis maupun hayati sangat berlimpah akan dapat menjadi sumber bagi pengembangan

sumber energi berkelanjutan. Tidak dapat ditolak bahwa keberlanjutan energi menjadi penentu bagi daya saing bangsa.⁶⁸

Ideologi yang kokoh dan telah menjadi kesepakatan bersama secara nasional merupakan peluang bagi peningkatan daya saing. Hal ini terlihat juga pada semakin berkembang baik sistem politik demokrasi di Indonesia. Sosial budaya yang berkembang saat ini juga sudah menjadi lebih baik, pemahaman tentang perbedaan budaya semakin meningkat dengan tetap tidak mengabaikan adanya kendala yang ada. Secara ekonomi, beberapa usaha penguatan ekonomi berbasis pada sektor riil juga mulai ditumbuhkan dalam berbagai kebijakan. Keamanan nasional secara keseluruhan tidak terjadi gejolak terkait dengan jati diri bangsa meski beberapa kerusuhan yang bersifat SARA masih terjadi pada kelompok dan daerah tertentu.

Kendala Lingkungan Strategi

Posisi silang Indonesia saat ini menjadi ajang pertemuan ideologi besar dunia, dan saat ini sangat kuat dipengaruhi oleh ideologi liberalisme kapitalis. Ideologi lokal regional belum secara nyata mampu berkontribusi pada interaksi ini. Berbagai aktivitas baik ekonomi maupun budaya masih didominasi budaya asing. Keanekaragaman hayati tropis masih dieksploitasi sebagai bahan mentah yang memiliki nilai tambah rendah. Selain

⁶⁸ Op cit 4

itu, bentuk kepulauan Indonesia menjadikan garis pantai yang panjang namun belum didukung dengan keamanan yang baik, masalah perbatasan dan pencurian kekayaan laut juga masih marak. Teknologi untuk pemanfaatan kekayaan laut juga belum berkembang dengan baik.

Penduduk yang banyak belum menjadi sumber daya kreatif terbukti pada tingkat partisipasi kasar pendidikan yang masih rendah, kesenjangan pendidikan Jawa-luar Jawa, Rasio peneliti dan produk paten yang rendah, tingkat kesejahteraan yang tidak merata (kaya-miskin). Sifat konsumerisme yang relatif tinggi menjadikan masyarakat cenderung menyerap produk dan tidak memproduksi hasil untuk kebutuhan global. Didukung dengan mental *inferiority complex* yang melihat hasil-hasil dari Barat selalu lebih baik dari produk sendiri. Hal ini juga berdampak pada neraca ekonomi nasional yang lebih tinggi import dari pada eksport.

BAB V
KONDISI PENINGKATAN CIVIL SOCIETY YANG
DIHARAPKAN

1. Umum

Bab ini menggambarkan situasi yang diharapkan terkait dengan *civil society* yang diinginkan untuk dapat mendukung ketercapaian tujuan nasional. Dengan keadaan ini, maka akan muncul suatu struktur masyarakat baru dari hasil sebuah perubahan sosial yang memungkinkan untuk terjadinya interaksi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat madani. Beberapa bahasan yang dicakup dalam bab ini adalah (1) kondisi yang diharapkan dalam peningkatan *civil society*, (2) kontribusi peningkatan *civil society* terhadap kemajuan IPTEK dan ketahanan nasional, dan (3) indikator keberhasilan dalam peningkatan *civil society*. Dengan struktur penulisan seperti itu, diharapkan akan diperoleh kontras antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan; sehingga dapat dikembangkan kebijakan, strategi, dan upaya yang dibahas di Bab IV.

2. Kondisi Ideal Peningkatan Civil Society

Sesuai tujuan untuk melakukan kontras antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, maka cara pandang tentang

civil society perlu disamakan dengan cara pandang ketika permasalahan pandang kondisi saat ini dielaborasi. Dalam hal ini, konsep Hyden tentang lima indikator *civil society* tetap akan digunakan.

Kebebasan Berekspresi

Pemahaman masyarakat tentang pemahaman makna kebebasan akan berpengaruh pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sebagian besar masyarakat kurang sesuai dalam memahami makna kebebasan. Kebebasan seringkali diartikan sebagai kebebasan untuk melakukan apapun tanpa ada aturan dan hukum. Masyarakat yang memahami kebebasan seperti ini terlalu menyederhanakan makna sebenarnya. Dengan pengaturan yang baik diharapkan kebebasan berkespresi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan tidak merugikan bagi orang lain. Di satu sisi masyarakat dapat secara bebas untuk menyampaikan ide-ide pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek, namun masyarakat juga dapat mengatur secara mandiri sebagai masyarakat madani dalam menentukan hal-hal apa yang layak di ekspresikan dan hal apa yang justru perlu ditutupi dari khalayak karena aspek negatif yang akan dibawanya. Ada beberapa ukuran kebebasan dalam berekspresi terutama terkait dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Dengan hal ini state dan non-state actor dapat saling

berkolaborasi untuk orientasi yang sama, yaitu pembangunan masyarakat yang lebih baik dalam berbagai aspek, moral pada utamanya.

Untuk pengembangan, pemajuan, dan pemanfaatan IPTEK, dalam masyarakat yang memiliki kebebasan berekspresi akan tumbuh kreativitas, inovasi, dan invensi yang lebih baik. Kecenderungan dalam masyarakat yang memiliki kebebasan berekspresi inovasi dilakukan dengan cara yang lebih terbuka, kolaboratif, dan dengan sumber daya yang dapat diakses secara global (lokal dan dunia). Konsep *open source innovation* dimana inovasi dapat dilakukan pada tingkat individu (oleh seseorang), organisasi, atau masyarakat/ komunitas/ negara.

Kreativitas individu, kelompok, serta komunitas semakin penting dalam memicu inovasi. Kreativitas ini dapat tumbuh subur pada situasi dan suasana tertentu. Dalam suatu masyarakat madani dimana tiap-tiap individu memahami peran dan perilaku yang harus ditunjukkan dalam masyarakat, kreativitas akan cenderung subur. Terlebih bila suasana lingkungan komunitas digerakkan oleh orang-orang yang saling mempercayai, ada iklim komunikasi positif, ikatan informal yang kuat, pelibatan individu-individu dalam masyarakat untuk proses pengambilan keputusan, dan pemberian penghargaan yang sesuai dengan proses dan hasil akhir.

Untuk membangun kebebasan berekreasi yang

mendorong pada kreativitas perlu memperhatikan tiga komponen kreativitas, yaitu: keahlian, keterampilan berpikir kreatif, dan motivasi. Hal-hal ini yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan masyarakat melalui berbagai sosialisasi pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara kualitas individu-individu dengan kualitas pembangunan masyarakat madani.

Kebebasan Berkumpul

Ada beberapa sub indikator terkait dengan kebebasan berkumpul, yaitu jumlah dan jenis organisasi politik dan organisasi non pemerintah (NGO), dan asosiasi profesi. Dalam usaha membangun pilar demokrasi sebagai prasyarat tumbuhnya masyarakat madani, Indonesia cukup toleran dengan memberi peluang munculnya berbagai partai politik sebagai wahana berkumpul. Dalam masyarakat madani yang baik, dimana kualitas individu pendukung masyarakat juga baik, akan muncul politisi-politisi di organisasi politik, organisasi masyarakat, dan CSO lain yang memiliki orientasi yang jelas dalam mengelola perkumpulan yang diikuti. Hal ini disebabkan tingkat feasibilitas pimpinan parpol yang tinggi untuk mencari orang yang mau dijadikan pengurus dan calon anggota legislatif yang kredibel. Sehingga diharapkan banyak pengurus parpol dan caleg yang paham berbagai isu-isu politik untuk pembangunan nasional.

Dalam kebebasan bersyarikat atau berkumpul dapat menjadi sarana untuk memunculkan berbagai kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK guna peningkatan kualitas hidup masyarakat keseluruhan. Organisasi-organisasi *civil society* (CSO- Civil society Organization) menjadi pemegang peranan yang sangat penting. CSO berperan dalam layanan yang esensial, memberikan pendampingan kelompok pinggiran dan juga pertimbangan pada kebijakan publik dalam pemanfaatan IPTEK. Keharmonisan antara CSO, pemerintah, penyandang dana, dan masyarakat sendiri terkait sumber pendanaan, dampak aktivitas, dan kejelasan tujuan organisasi akan menjadi pendorong inovasi IPTEK untuk masyarakat.

Dalam masyarakat madani yang diharapkan, kebebasan berkumpul tetap menunjang etika dan kepatuhan masyarakat pada aturan sehingga dapat menciptakan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi sebaliknya akan menyebabkan kehidupan politik dan demokrasi pincang dan tidak menghadirkan sesuatu yang positif bagi IPTEK di masyarakat. Peran para pemimpin di tiga elemen masyarakat madani untuk bersama-sama berikhtiar dan bertindak nyata untuk membangun kepatuhan masyarakat kepada aturan, etika, dan pranata merupakan hal yang diharapkan. Bagaimanapun, dalam masyarakat madani yang mengutamakan

demokrasi dalam kebebasan berkumpul, napas dan nilai utama demokrasi adalah kebebasan dan aturan atau kepatuhan kepada pranata, termasuk pranata hukum, pranata agama dan pranata sosial.

Dalam kepatuhan ini akan juga muncul berbagai model atau praktek moral dan etika terkait dengan IPTEK seperti *bioethics, sustainable developmen on engineering, green technology*, dll. Masyarakat melalui individu-individu dapat mengarahkan kebebasan berekspresi dan berkumpul dengan tetap memperhatikan rambu-rambu pengembangan, pemajuan, dan pemanfaatan IPTEK. Masyarakat ini yang akan menjadi pilar pencapaian ketahanan nasional yang kokoh dengan didukung IPTEK yang sesuai dengan karakteristik bangsa.

Kebebasan dari Diskriminasi

Dalam masyarakat madani, kebebasan dari diskriminasi dapat dilihat pada tingkat layanan keadilan hukum atau penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum yang tinggi dapat terjadi ketika demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan mantap. Hal ini dapat terjadi ketika anggota masyarakat telah memiliki pendidikan yang baik sehingga memahami perannya dalam penegakan hukum yang adil. Kesadaran yang baik ini akan menyebabkan stabilitas politik dan tingkat kekerasan yang relatif rendah.

Dalam Pasal 1c Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Implementasi masyarakat madani akan memunculkan kondisi yang diharapkan dimana tidak adanya diskriminasi. Dengan demikian, di masyarakat tidak ada diskriminasi baik yang dilakukan antar kelompok masyarakat sendiri maupun diskriminasi yang disponsori negara. Hilangnya kedua jenis diskriminasi itu akan berdampak pada tingkat kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat. Hilangnya diskriminasi antarkelompok masyarakat akan menurunkan aneka ketegangan sosial akibat hubungan yang tidak equal. Sementara hilangnya diskriminasi oleh negara akan menghindarkan dari otoritarianisme.

Masukan untuk Pengambilan Kebijakan

Sesungguhnya penyusunan kebijakan publik sejak awal

perlu melibatkan masyarakat secara bersama-sama menentukan arah kebijakan (model *bottom-up*), sehingga melahirkan suatu kebijakan yang adil dan demokratis. Pembuat kebijakan yang demokratis menawarkan dan mejunjung tinggi pentingnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Melalui cara partisipatif seperti itu akan melahirkan suatu keputusan bersama yang adil dari pemerintah untuk rakyatnya, sehingga akan mendorong munculnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Keputusan pemerintah yang mencerminkan keputusan rakyat akan mendorong terjadinya suatu sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

Masukan dalam pengambilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik. Diharapkan dalam masyarakat madani yang baik yang terlihat pada stabilitas politik, akan dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam mengambil kebijakan baik yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dengan tetap berorientasi pada aturan yang berlaku dan kemajuan masyarakat. Tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan yang membaik sangat dipengaruhi oleh semakin berkurangnya berbagai problem kemasyarakatan di Indonesia.

Dalam masyarakat madani yang berjalan diharapkan partisipasi diberi makna sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang bertanggungjawab dan relevan dengan tujuan pembangunan masyarakat baik dalam proses pengambilan keputusan

dan monitoring kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Berbagai peraturan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara substantif telah dapat mengatur bagaimana partisipasi masyarakat itu dilaksanakan. Sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat egaliter, dalam arti tidak hanya pemerintah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, namun masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kondisi lain yang perlu diciptakan pemerintah dalam pelibatan masyarakat pada kebijakan pembangunan yaitu; (1) tersedia instrument hukum yang secara substantif mengatur pelibatan masyarakat, sehingga mekanisme pelibatan masyarakat menjadi jelas; (2) perlu keterbukaan dan akuntabilitas dari pihak pemerintah yang peka terhadap kepentingan publik; dan (3) masyarakat perlu bersatu dalam suatu wadah yang terorganisir dan independent yang dapat digunakan sebagai saluran partisipasi.

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan pembangunan penting dilakukan, karena pelibatan masyarakat dalam membuat kebijakan merupakan faktor utama dalam *good governance* yang memberikan manfaat besar terhadap kepentingan public, diantaranya meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat dan sebagai sumber bahan masukan terhadap pemerintah sebelum memutuskan kebijakan. Keunggulan partisipasi adalah menjamin

ketercapaian tujuan, keberlanjutan, terakomodasinya suara kelompok marjinal terutama kelompok miskin dan perempuan.

Partisipasi masyarakat dalam riset dan pengembangan iptek yang berpola lintas-disiplin dipandang penting untuk memicu pertukaran dan sintesis keilmuan di antara para pelaku iptek di lembaga riset/ perguruan tinggi, dan di industri/ organisasi usaha. Riset dan pengembangan iptek secara lintas-disiplin yang mencakup ilmu sosial dan kemanusiaan diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan lingkungan yang kondusif bagi difusi dan pemanfaatan iptek di masyarakat, dan menjamin adanya akuntabilitas moral, sosial dan lingkungan dari pemanfaatan iptek.

Percepatan difusi dan pemanfaatan iptek, peningkatan kapasitas kelembagaan iptek, dan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi menjadi bagian yang terpadu untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui: (1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penentuan pilihan iptek yang akan dikembangkan dan dimanfaatkan; (2) minimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul dari pemanfaatan iptek; (3) pengembangan kapasitas masyarakat untuk mengadopsi dan mengadaptasi iptek, dengan memperhatikan potensi sumber daya alam lokal, pengetahuan dan kearifan lokal; (4) kesiapan regulasi, infrastruktur metrologi legal, tata niaga, dan iklim investasi dalam pemanfaatan iptek untuk tujuan komersial.

Peningkatan kapasitas kelembagaan iptek mencakup

pengembangan kompetensi individual, ketersediaan sarana dan prasarana, dan pengembangan iklim yang kondusif bagi komunikasi dan kolaborasi intra dan antar lembaga, dan iklim yang kondusif bagi efektivitas kepemimpinan. Peningkatan kapasitas kelembagaan iptek mencakup pengembangan di semua aspek tersebut secara terpadu dan pengembangan berbagai faktor penunjang pembelajaran, interaksi dan komunikasi baik intralembaga maupun antarlembaga pendukung elemen masyarakat madani. Berbagai sumber daya yang terdapat di lembaga pemerintah (*government*), organisasi masyarakat (CSO), dan organisasi usaha (*business organizations*) dapat dimobilisasi untuk mengembangkan berbagai hal tersebut di atas melalui jejaring ketiganya.

Kesadaran/ Penghargaan pada Hukum

Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal berjalan dengan baik. Kondisi tersebut, antara lain, terlihat pada ketersediaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan mempunyai materi yang saling melengkapi satu sama lain serta mencerminkan keadilan. Hal tersebut juga diikuti dengan tindakan pemberian peluang keterlibatan masyarakat untuk ikut

dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan permasalahan dan sekaligus menjadi tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan hukum sebagai mana dibahas pada bagian sebelumnya.

Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin membaik dengan berkurangnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM); termasuk di dalamnya penuntasan penyelesaiannya secara hukum. Aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan memiliki otoritas dan kemampuan yang semakin baik dalam memberikan layanan pada publik. Demikian juga dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan salah satu prioritas untuk dilaksanakan dalam pembangunan hukum.

Adanya kekerasan horizontal dan vertikal yang semakin berkurang dengan semakin menguatnya kembali penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan semakin tinggi kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan berkurangnya berbagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini merupakan hasil dari sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah ditetapkan, baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara untuk menciptakan persamaan persepsi. Pemahaman yang baik akan masyarakat madai terjadi melalui

peningkatan pemahaman dan penyadaran hukum di semua lapisan masyarakat terhadap pentingnya hak-hak dan kewajiban masing-masing individu yang membentuk budaya hukum yang baik.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini ternyata mampu menembus batas-batas negara yang paling dirahasiakan. Penegakan hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat madani akan sangat mempengaruhi perkembangan, pemajuan, dan pemanfaatan IPTEK. Hal ini terutama dalam penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam masyarakat madani modern setiap orang cenderung pada kemajuan dengan berkembangnya budaya teknologi (*technology of culture*). Dengan demikian setiap hal, termasuk HAKI tidak lagi dapat digunakan begitu saja karena dipantau oleh berbagai komponen dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai akibatnya maksud tertentu guna meraih keuntungan dengan cara-cara tidak terhormat yang merugikan orang atau negara lain melalui hasil ciptaan yang dilindungi oleh perangkat hukum dapat dihindari. Perkembangan iptek lambat laun akan mampu mengungkapkan adanya kecurangan yang terjadi selama ini terhadap ciptaan yang bernilai ekonomis.

Berkembangnya paradigma baru pada perlindungan atas hak kekayaan intelektual, maka perbuatan seperti membajak, meniru, memalsukan ataupun mengakui sebagai hasil ciptaan sendiri atas hak cipta orang lain atau pemegang izin dari ciptaan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi hukum.

Perbuatan demikian amat merugikan bagi masa depan perkembangan iptek dan kepentingan para pencipta yang telah berusaha dengan susah payah guna tercipta suatu penemuan baru untuk kemaslahatan umat manusia. Perkembangan ini menyebabkan semua sektor kehidupan seperti ekonomi, hukum dan budaya akan semakin bersaing untuk mengejar ketinggalannya dalam era persaingan global yang kini semakin komparatif dan kompetitif.

3. Kontribusi Peningkatan Civil society guna Pemajuan IPTEK dalam rangka Ketahanan Nasional

Posisi Indonesia dalam pemanfaatan e-government untuk pengembangan *civil society* yang optimal untuk pengembangan *civil society* akan menyebabkan keberanian untuk berkreasi menjadi lebih tinggi dan mendapat ruang di masyarakat. Sehingga hal ini akan menyebabkan penyaluran ide-ide dan juga secara psikologis, masyarakat akan bersemangat dan termotivasi dalam melakukan inovasi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK. Hal ini dapat dilihat pada tingkat Technology and Science Index yang semakin baik. Tingginya kemampuan inovasi akan berpengaruh pada tingginya aktivitas Research and Development sebagai salah satu faktor penentu perkembangan IPTEK. IPTEK yang tumbuh dengan baik akan berimplikasi pada produk engineering yang dihasilkan juga semakin baik dan beragam, dan ini akan menyebabkan support pada aktivitas

bisnis juga semakin tinggi (dapat dilihat pada tingkat daya saing produk industri Indonesia yang meningkat); berarti CS juga berkembang lebih baik.



Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia dengan pertumbuhan pengguna Internet yang signifikan. Pembangunan infrastruktur komunikasi di Indonesia lebih merata akan mengurangi kemungkinan terjadinya diskriminasi akses informasi. Kebebasan informasi itu sendiri untuk tahu (*the right to know*) keputusan-keputusan penting yang menyangkut hidupnya menjadi semakin baik. Selain juga akan terjadi pengurangan ataupun penurunan kasus diskriminasi baik dalam aspek pembangunan daerah maupun dalam penegakan keadilan di masyarakat. Kontribusi dari hal ini adalah pertumbuhan dan ketersediaan sumber daya manusia yang memahami IPTEK menjadi semakin luas dan banyak dengan kualitas yang memadai. Akses pada pengetahuan baik melalui pendidikan yang baik (lihat pada APK Pendidikan Tinggi tiap daerah) maupun aktivitas pendidikan non formal juga menjadi lebih baik. Hal ini memberikan kontribusi pada peningkatan Human Capital Investment yang lebih adil dan baik. Ketersediaan SDM ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan IPTEK menjadi lebih berkembang dengan baik.



Masukan dalam pengambilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik. Tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan yang semakin tinggi dapat dicapai ketika berbagai problem kemasyarakatan di Indonesia terselesaikan dengan baik. Penyediaan infrastruktur, peluang pada pengembangan kewirausahaan, ketersediaan sumber dana menjadi terdukung dengan baik karena masing-masing telah mulai meningkatkan fokus pada masalah level lebih tinggi. Implikasi hal ini adalah membaiknya *Risk Capital and Entrepreneurial Infrastructure* dan *Technology and Science Workforce*. Hal ini yang menjadikan pemajuan IPTEK berkembang lebih baik.



Selain itu isu korupsi yang ada di pemerintahan akan menjadi penghalang bagi implementasi *civil society* yang baik semakin berkurang. *Respect to rules* yang semakin baik akan berkontribusi tingkat kejahatan yang menurun dan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Kedua hal ini akan menyebabkan adanya kestabilan sosial dan politik. Selain berkontribusi pada komitmen yang tinggi dalam pengembangan IPTEK yang terlihat

pada tingkat konsentrasi dan dinamisasi IPTEK; ini yang menjadikan pemajuan IPTEK juga tumbuh dengan baik.



Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun ketahanan nasional. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi (*Techno-Economy Paradigm*), teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Akibat paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (*Resource Based Economy*) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (*Knowledge Based Economy/KBE*). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing.

4. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dapat dilihat pada indikator input, indikator proses, indikator output dan outcome. Selain itu, indikator yang digunakan perlu memperhatikan indikator keberhasilan

pembangunan nasional termasuk yang perlu diberi penekanan disini adalah MDGs (millenium development goals) sebagai indikator keberhasilan dalam interaksi global. Sebagai bahasan akan dicoba pencermatan indikator keberhasilan yang terkait dengan masing-masing persoalan. Pada akhir bagian ini akan dicoba untuk meringkas indikator keberhasilan implementasi *civil society*.

a. Pembangunan berbagai bidang dan sektor yang adil dan merata.

Pemerataan pembangunan antar daerah akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa indikator pemerataan ini adalah:

- 1) Ada pusat pertumbuhan ekonomi baru (*growth pole*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu, pembangunan infrastruktur ekonomi di kawasan potensial dan kawasan agropolitan. Tujuannya, pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat tidak hanya terjadi di pusat kota (pusat pemerintahan). Tetapi, itu juga terjadi di wilayah yang lain. Wilayah potensial dan agak jauh dari pusat pemerintahan dipilih menjadi pusat pertumbuhan baru.
- 2) Pembangunan infrastruktur dan suprastruktur ekonomi. Hal ini akan dapat memacu pendapatan masyarakat dan pmda. Dengan dibangunnya sarana dan prasarana ekonomi baru, secara otomatis akan bisa mendatangkan investasi dan mampu menggeliatkan ekonomi masyarakat.

- 3) Distribusi pendapatan sebagai indikator pemerataan pembangunan dapat dilihat pada komposisi penguasaan ekonomi (omzet) antara pengusaha besar, dan masyarakat umum dimana saat ini 10 konglomerat yang menguasai sekitar 30% PDB atau 200 konglomerat yang menguasai 58% PDB. Indikator ini dapat diperbaiki dengan pemerataan pembangunan yang memberdayakan masyarakat madani dalam bidang ekonomi.
- 4) Distribusi Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar hingga Pendidikan tinggi di tiap daerah. Bagaimanapun masyarakat madani yang melek IPTEK dapat tumbuh ketika tingkat dan kualitas pendidikan semua anggota masyarakat menjadi lebih baik.

b. Kejelasan peran dan tanggung jawab antara CSO, pemerintah, dan pelaku bisnis

Keberhasilan peningkatan *civil society* terjadi ketika ada sinergitas antara organisasi penggerak *civil society*, pemerintah, dan pelaku bisnis. Tujuan bersama yang berorientasi pada pembangunan nasional menjadi ukuran keberhasilan kolaborasi ini. Beberapa sarana integrasi ketiga pelaku peningkatan *civil society* seperti media elektronik, maupun cetak perlu untuk dimanfaatkan secara bijak dalam rangka peningkatan *civil society* melalui sinergitas.

Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat tentu harus memiliki tanggung jawab karena integrasi dan kolaborasi bukanlah bertepuk sebelah tangan. Meskipun semua pihak memiliki tanggung jawab, pemerintah tetap harus mengambil prakarsa paling tidak untuk menciptakan iklim yang merangsang bagi usaha kerjasama, yang dapat diindikasikan pada:

- 1) Adanya kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang jelas dalam tujuan, arahan maupun indikator-indikator kebijaksanaan (*policy indicators*),
- 2) Adanya prioritas pembangunan yang realistis dan diikuti oleh semua elemen masyarakat madani, baik pemerintah maupun dunia usaha dan organisasi masyarakat,
- 3) Adanya mekanisme komunikasi yang lancar dan transparan secara mantap; transparansi erat kaitannya dengan tingkat partisipasi dan oleh karena itu, sejak pada tahap awal mekanisme kemitraan yang transparan harus dikembangkan dan dimantapkan, adanya pilihan-pilihan atas pola-pola kemitraan yang dapat mencakup kepentingan-kepentingan yang ada di berbagai lapisan dan golongan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan serta seluas-luasnya dalam kemitraan pembangunan,
- 4) Adanya kerangka peraturan dan arahan serta pedoman yang dapat menjadi acuan nilai bersama. Hal ini akan

meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, kreativitas dan inovasi yang terukur.

c. Kesadaran hukum dan penghargaan pada keadilan yang semakin baik

Kesadaran hukum dan penghargaan pada keadilan diharapkan terjadi tidak hanya pada masyarakat, namun juga pada para pelaku peningkatan *civil society*. Kasus-kasus konflik di masyarakat (meski terkadang merupakan strategi perang asimetris) yang semakin rendah merupakan indikasi kesadaran hukum yang lebih baik. Demonstrasi yang dilakukan oleh para pekerja dalam kasus pelaku bisnis juga merupakan persoalan yang dapat diselesaikan. Keadaan yang kondusif karena kesadaran hukum dan penghargaan keadilan yang lebih baik akan berampak pada kestabilan sosial dan politik dan ini akan berakibat pada kuatnya sistem sosial pendukung kemajuan *civil society*.

Beberapa indikator keberhasilan dalam kesadaran hukum dan penghargaan pada keadilan adalah:

- 1) Adanya dukungan semua pihak dalam memecahkan masalah sosial yang ada dalam masyarakat serta bersifat “action oriented“ atau memotivasi masyarakat untuk bertindak melakukan suatu perubahan yang positif dan mengambil bagian tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini juga

dapat dilihat pada persentase keterlibatan masyarakat sasaran kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

- 2) Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah “kesetiaan” seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, sedang “kesadaran hukum masyarakat” masih bersifat abstrak belum merupakan bentuk perilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak hukum itu sendiri. Indikator yang dapat dipakai lebih tepat pada kepatuhan hukum di masyarakat. Kebudayaan hukum yang berkembang di masyarakat ternyata lebih banyak mencerminkan bentuk perilaku oportunistik menjadi berkurang.

d. Ketersediaan, penegakan moral dan etika profesi yang meningkat

Dalam setiap asosiasi profesi seharusnya telah ada moral dan etika profesi. Ketika berbagai profesi telah memiliki konsep dan aturan tentang moral dan etika profesi, maka penegakan nilai akan menjadi lebih baik. Sumber daya yang dimiliki untuk membangun *civil society* yang lebih baik dapat dikelola secara profesional dengan menghilangkan terjadinya penyimpangan dalam berbagai bentuk termasuk KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Etika profesi yang ditegakkan dalam masyarakat

madani dapat dilihat pada:

1. Keterlibatan anggota profesi untuk mengevaluasi tindakan alternatif dan membuat pilihan-pilihan yang lebih baik dalam pengembangan masyarakat madani melalui profesi-profesi yang ada.
2. Tingkat aktivitas *sharing* pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai antar masyarakat profesional sehingga dapat dilakukan monitoring profesi dengan menunjukkan perilaku mana yang etis dan tidak etis selain dapat dikurangi tekanan dari pihak lain – *clients*, pemerintah, dsb dalam rangka pembangunan masyarakat.
3. Semua elemen masyarakat madani menjalankan peran dan fungsinya mengacu pada nilai profesionalitas yang tinggi dan ditunjukkan pada capaian-capaian program yang berorientasi kepentingan jangka panjang masyarakat itu sendiri.

e. Komitmen akuntabilitas pemerintah meningkat

Pembangunan dan demokrasi merupakan pendukung berjalannya *civil society*. Dan untuk itu dibutuhkan akuntabilitas dan responsibilitas semua yang menjalankan demokrasi dan pembangunan yaitu para pelaku *civil society*. Akuntabilitas ini perlu adanya pelibatan masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam politik

dan pembangunan menjadi yang utama dalam mendukung keberhasilan peningkatan *civil society*. Selain itu adalah adanya peluang untuk mengakses informasi anggaran dan kesempatan melakukan pencermatan lebih dalam melalui audit institusi dan legislatif. Penilaian publik atas pengendalian keputusan dan pengambil keputusan, kesamaan derajat untuk dihargai dan berpendapat (*equality of respect and voice*) antar warga masyarakat dapat digunakan untuk melihat tingkat kepercayaan publik.

f. Sinergi dan intermediasi pemajuan IPTEK antar lembaga membaik

Kebijakan bidang pendidikan, industri, dan iptek yang belum terintegrasi dapat menyebabkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna yaitu industri. Disamping itu kebijakan fiskal juga dirasakan belum kondusif bagi pengembangan kemampuan iptek. Mekanisme intermediasi iptek diharapkan dapat menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna. Beberapa prasyarat adalah tertatanya infrastruktur iptek, antara lain institusi yang mengolah dan menterjemahkan hasil pengembangan iptek menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi, efektifitas

sistem komunikasi antara lembaga litbang dan pihak industri termasuk dalam pemberdayaan industri kecil menengah berbasis teknologi.



BAB VI

KONSEPSI PEMECAHAN MASALAH PENINGKATAN CIVIL SOCIETY

1. Umum

Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, yaitu adil dan makmur bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapainya berbagai sistem kenegaraan muncul, seperti demokrasi. Cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlaksana apabila semua bidang pembangunan bergerak secara terpadu yang menjadikan manusia sebagai subjek. Pengembangan masyarakat sebagai sebuah kajian keilmuan dapat menyentuh keberadaan manusia yang berperadaban. Pengembangan masyarakat merupakan sebuah proses yang dapat merubah watak, sikap dan prilaku masyarakat ke arah pembangunan yang dicita-citakan.

Masyarakat madani bukanlah sesuatu yang diperoleh begitu saja, namun merupakan suatu proses yang panjang. Dalam masyarakat madani perlu terbangun setidaknya tiga fungsi penting, yaitu: mendorong pada kesukarelaan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan dan peningkatan social capital dan menciptakan lingkungan yang

mampu (enabler environment) untuk masukan kebijakan. Sikap sukarela merupakan aspek kunci dalam masyarakat madani. Kesiapan masyarakat untuk berperan serta dengan yang lain dalam mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan yang lain merupakan akar bagi pembangunan.

Aktivitas bersama terjadi ketika ada kombinasi antara berbagai kepentingan individu yang terpenuhi dengan tanpa menghilangkan motivasi. Perluasan hubungan dari individu, keluarga, dan masyarakat dalam pencapaian tujuan yang lebih luas menjadi penting. Perkumpulan yang ada dalam masyarakat untuk pencapaian tujuan itu perlu berdasar pada rasa percaya dan saling menguntungkan. Dengan demikian masyarakat madani akan menghasilkan kekayaan sosial yang lebih baik. Kekayaan sosial dapat dilihat pada semakin hilangnya sekat-sekat kesukuan, agaman, bahasa dan yang lainnya. Setiap tindakan dalam masyarakat lebih ditujukan dan diorientasikan pada nilai-nilai masyarakat bersama meski tetap memperbolehkan nilai individual untuk hal-hal yang bersifat individu. Dengan social capital yang baik ini, maka akan tumbuh suatu lingkungan yang dapat memungkinkan terbentuknya kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Kebijakan yang baik ini memerlukan beberapa prasyarat agar menjadi kebijakan yang berkelanjutan (*sustainable*). Beberapa yang dapat dijadikan prasyarat adalah:

a. ***Openness (Keterbukaan)***

Sebagai keseimbangan interest/ keinginan untuk mengakses data untuk peningkatan kualitas, efisiensi, dan inovasi bagi masyarakat.

b. ***Transparency (Transparansi)***

Menjadikan informasi pada suatu data yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat tersedia dan digunakan secara bersama untuk kepentingan masyarakat.

c. ***Legal conformity (Kesesuaian Legal)***

Adanya kesesuaian antar semua aturan yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk kesesuaian dengan kepentingan nasional.

d. ***Formal responsibility (tanggungjawab formal)***

Mendorong secara eksplisit, institusi formal untuk berperan dalam tanggungjawab pada berbagai pemanfaatan sumber daya masyarakat bagi pencapaian tujuan bersama dalam peningkatan kualitas hidup.

e. ***Professionalism (profesionalisme)***

Pengembangan budaya profesional (ahli dan beretika) dalam berbagai aktivitas bersama yang sesuai dengan etika profesi maupun aturan yang berkembang dan digunakan dalam masyarakat.

- f. **Protection of intellectual property (perlindungan HAKI)**
Pemanfaatan sumber daya yang ada dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan persyaratan kepemilikan.
- g. **Interoperability**
Penggunaan standar yang dapat saling digunakan antar kelompok dengan aktivitas yang lebih luas dalam masyarakat sehingga memungkinkan perluasan pemanfaatan bagi yang lain melalui berbagai upaya kerjasama.
- h. **Accountability (akuntabilitas)**
Penilaian kinerja pada setiap aktivitas dapat diterima dengan baik karena kesesuaiannya dalam pencapaian tujuan.

Pemahaman bahwa *civil society* sebagai tatanan masyarakat yang baik merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena merupakan suatu kontribusi secara sukarela bagi perlawanan terhadap kecenderungan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok yang lain atas dasar ideologis. Hubungan yang baik antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia bisnis perlu dibangun atas dasar saling percaya melalui sebuah kontrak sosial yang saling mendukung pada pencapaian tujuan bersama terkait dengan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Namun demikian, ketika masyarakat yang baik memerlukan koordinasi kegiatan dan tindakan antara institusi yang berbeda agar menjadi searah, bagaimana masyarakat menentukan tujuan,

dan apakah masyarakat telah benar dalam membangun lingkungan dan kondisi yang terus berubah sepanjang waktu, bagaimana keputusan kolektif dibangun, negosiasi dilakukan; semua ini perlu dirumuskan melalui sebuah kebijakan, strategi, dan upaya.

Dalam pengembangan IPTEK sangat dibutuhkan keterkaitannya (*linkage*) dengan inovasi di masyarakat. Hal ini terjadi ketika antara pemerintah, dunia bisnis, dan *civil society* disatukan. Dengan hal ini, hasil inovasi dapat segera dikomersialisasikan dalam usaha untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi. Konsep tentang *public-private partnerships* merupakan salah satu konsep yang dapat digunakan untuk menawarkan inovasi berbasis pengetahuan, mobilitas penelitian personal, penciptaan lingkungan bisnis yang mantap untuk pemajuan IPTEK.

Dari landasan teori, evaluasi diri (kondisi saat ini), analisis lingkungan strategis, dan kondisi yang akan dicapai, dapat diketahui bahwa untuk mencapai tujuan implementasi *civil society* guna pemajuan IPTEK ada beberapa faktor krisis (*critical factors*) yang perlu diperhatikan, yaitu: demokratisasi, kolaborasi dan partnership, partisipasi, penguatan institusi, dialog antar komponen CS, inisiatif, dan berbagi informasi. Dengan demikian, upaya yang diturunkan dari kebijakan dan strategi perlu memperhatikan faktor-faktor kritis agar efektif

dalam pencapaian tujuan.

Konsepsi peningkatan *civil society* dirumuskan dalam suatu kebijakan yang tepat sebagai respons atas permasalahan yang muncul. Dari kebijakan yang telah dirumuskan tersebut, kemudian disusun strategi yang tepat, guna mencapai sasaran yang ditetapkan, serta ditetapkan solusi pemecahannya melalui upaya atau tindakan nyata yang utuh, menyeluruh dan terpadu dari semua pihak yang terkait dalam *civil society*, sehingga dapat diwujudkan pemajuan IPTEK dalam rangka ketahanan nasional.

2. Kebijakan

Masyarakat madani jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam masyarakat madani, warga negara bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-governmental untuk mencapai kebaikan bersama melalui aktivitas tiga elemen dasar masyarakat madani atau *civil society*. Karena itu, tekanan sentral masyarakat madani adalah terletak pada independensinya terhadap Negara namun bersifat keinginan membangun hubungan yang *konsultatif* bukan *konfrontatif* antara ketiga elemen tersebut. Masyarakat madani juga tidak hanya bersikap dan berperilaku sebagai *citizen* yang memiliki hak dan kewajiban, melainkan

juga harus menghormati *equal right*, memperlakukan semua warga negara sebagai pemegang hak kebebasan yang sama. Disinilah kemudian, masyarakat madani menjadi alternatif pemecahan, dengan pemberdayaan dan penguatan daya kontrol masyarakat secara bersama terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada akhirnya nanti terwujud kekuatan masyarakat sipil yang mampu merealisasikan dan mampu menegakkan konsep hidup yang demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia. Masyarakat madani dipercaya sebagai alternatif paling tepat bagi demokratisasi.



Kebijakan pada hakekatnya adalah suatu keputusan tentang rumusan umum untuk mengarahkan semua langkah yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan paradigma nasional, perkembangan lingkungan strategis, kondisi peningkatan *civil*

society saat ini, dan yang diharapkan, serta permasalahan yang dihadapi, peluang dan kendala, maka kebijakan peningkatan *civil society* guna pemajuan IPTEK Nasional dalam rangka pemantapan Ketahanan Nasional adalah:

Terwujudnya **sinergi** antara Pemerintah, dunia bisnis, dan organisasi masyarakat sebagai elemen ***civil society*** dalam peningkatan **kualitas sumber daya insani** guna pemajuan **IPTEK** dalam rangka **ketahanan nasional**.

3. Strategi

Banyak faktor yang turut menentukan dalam pemberdayaan masyarakat madani, gambaran masyarakat berdaya yang diidamkan sangat menentukan dalam perencanaan strategis dan upaya operasionalnya. Oleh sebab itu, seluruh sektor masyarakat (organisasi masyarakat madani, dunia usaha, dan pemerintah) yang concered dan committed pada masyarakat madani perlu mengembangkan strategi yang lebih stabil, lebih halus, bukan mengambil jalan konfrontasi langsung yang tidak mustahil akan mengorbankan aktor-aktor masyarakat madani itu sendiri.

Dengan berpedoman pada rumusan kebijakan tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan semua peluang dan kendala yang dihadapi, selanjutnya disusun strategi untuk

mewujudkan peningkatan *civil society* guna pemajuan IPTEK dalam rangka ketahanan nasional, yang mengandung unsur-unsur *ends, ways* dan *means*. Strategi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan **keadilan** dan **kemerataan** pembangunan berbagai bidang dan sektor
- b. Mengembangkan **kesepahaman** peran dan tanggung jawab antara CSO, pemerintah, dan pelaku bisnis
- c. Meningkatkan **kesadaran hukum** dan penghargaan pada keadilan
- d. Mengembangkan dan menegakkan **moral** dan **etika profesi**
- e. Meningkatkan komitmen **akuntabilitas** elemen CS
- f. Menumbuhkan **sinergi** dan **intermediasi** pemajuan IPTEK antar lembaga dalam CS

Daya saing yang bertanggung jawab bagi Indonesia tergantung pada seberapa dalam dan kuat kerjasama (*strategic partnership*) antara kegiatan bisnis yang inovatif, organisasi *civil society* yang berdaya (*enabler*), dan kebijakan pemerintah yang ambisius. Dengan kondisi geografis dan kebijakan yang sangat beragam antar daerah, pembangunan berkelanjutan membutuhkan kerjasama jangka panjang pada semua level dunia bisnis, masyarakat, dan pemerintah sebagai elemen penerapan *civil society*.

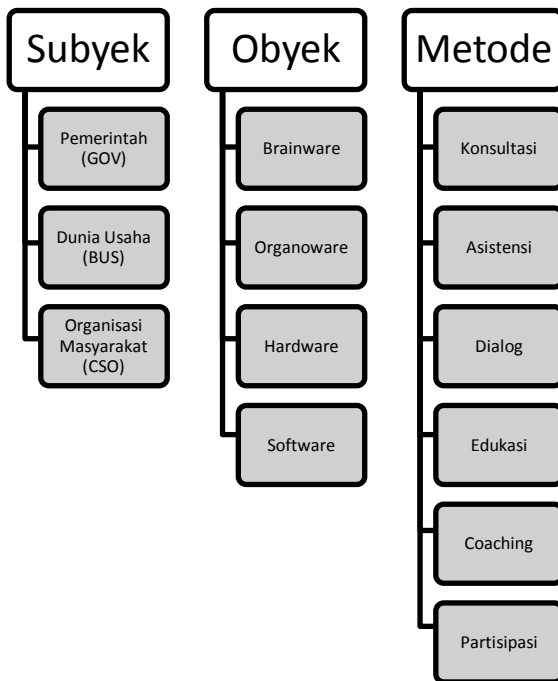
4. Upaya

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, masyarakat madani pada dasarnya adalah sebuah komunitas sosial dimana keadilan dan kesetaraan menjadi fundamennya. Muara masyarakat madani atau *civil society* adalah pada demokratisasi, yang dibentuk sebagai akibat adanya partisipasi nyata anggota kelompok masyarakat. Sementara hukum diposisikan sebagai satu-satunya alat pengendalian dan pengawasan perilaku masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan masyarakat madani akan terlihat pada ditemukannya fenomena, (a) demokratisasi, (b) partisipasi sosial, dan (c) supremasi hukum; dalam masyarakat.

Social society berkaitan dengan *public critical rational discourse* yang secara eksplisit mempersyaratkan tumbuhnya demokrasi. Dalam kerangka itu hanya negara yang demokratis yang menjamin masyarakat madani. Pelaku politik dalam suatu negara cenderung menyumbat masyarakat sipil, mekanisme demokrasi lah yang memiliki kekuatan untuk mengoreksi kecenderungan itu untuk terbentu masyarakat madani. Sementara itu untuk tumbuhnya demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran berpribadi, kesetaraan, dan kemandirian. Syarat-syarat tersebut dalam konstataasi relatif memiliki linearitas dengan kesediaan untuk menerima dan memberi secara berimbang. Maka dalam konteks

itu, mekanisme demokrasi antar komponen bangsa, terutama pelaku praktis politik, merupakan bagian yang terpenting dalam menuju masyarakat yang dicita-citakan tersebut.

Upaya yang dipilih untuk setiap strategi peningkatan *civil society* pada dasarnya adalah langkah-langkah, usaha dan tindakan untuk membentuk dan atau merubah sikap serta menyatukan pandangan, gerak langkah, pola tindak, dan pola pikir pihak-pihak terkait, sehingga memiliki kepedulian dan tanggung jawab dalam rangka menindaklanjuti kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan.



Dalam pengembangan upaya, agar upaya yang dikembangkan cukup komprehensif untuk mendukung pemajuan IPTEK, maka aspek komponen pemajuan IPTEK yang mencakup *brainware*, *organoware*, *hardware*, dan *software* perlu diperhatikan agar ketercapaian indikator keberhasilan menjadi optimal. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mewujudkan peningkatan *civil society* guna pemajuan IPTEK dalam angka ketahanan nasional secara diagram ringkas seperti gambar berikut.

Strategi I: Meningkatkan keadilan dan pemerataan pembangunan berbagai bidang dan sektor

- a. Pemerintah membuka wilayah-wilayah baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendekatkan pemasok dan pengguna. Paradigma pembangunan nasional yang berjalan perlu menempatkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merupakan agregasi dari pembangunan di daerah, sehingga kemajuan pembangunan nasional juga dirasakan oleh masyarakat di daerah. Sehingga terjadi pemerataan sumber daya. Perubahan ini perlu ditegaskan melalui serangkaian kebijakan pembangunan yang pendekatannya sejak dari daerah-daerah hingga ke pusat. Pembangunan harus digerakkan dari daerah-daerah dengan memanfaatkan ketersediaan potensi sumber dayanya disertai

pemberian wewenang, hak dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah.

- b. Pemerintah melakukan evaluasi peraturan-peraturan terkait dengan pembangunan daerah. Aspirasi masyarakat daerah memang perlu dihormati dan ditanggapi dalam pengelolaan daerah, namun kendalinya haruslah berdasarkan pada perencanaan yang menyeluruh sebagai kebijakan dasar dalam rangka penataan daerah-daerah di Indonesia. Perlu ada parameter yang kuat berdasar pertimbangan demografis, ekonomi, sosial, budaya, dan tata ruang termasuk pola pengelolaan wilayah perbatasan untuk memperhitungkan Indonesia itu sesungguhnya perlu terdiri dari berapa provinsi, dan masing-masing provinsi, terdiri dari berapa kabupaten dan kota. Hal ini yang dikembangkan dalam sistem peraturan yang baru. Kebijakan dasar ini seyogyanya menjadi landasan dalam menyikapi dan membahas usulan pembentukan wilayah pemekaran baru dalam upaya penguatan daerah. Pada akhirnya perlu keberanian politik untuk melakukan kajian khusus terhadap daerah-daerah yang secara finansial menghadapi masalah dalam membiayai daerahnya secara berkelanjutan. Ini berarti ke depan, tidak lagi hanya berbicara masalah pemekaran daerah, melainkan juga sekaligus penggabungan daerah-daerah dalam usaha pencapaian kualitas masyarakat yang lebih baik.

- c. Pemerintah mengembangkan birokrasi efektif, ketersediaan energi dan infrastruktur di wilayah-wilayah industri baru. Selain untuk mempercepat pembangunan sektor riil dan penuntasan kemiskinan, upaya ini juga diperlukan untuk mengantisipasi dampak ketidakmerataan pembangunan. Selain dibutuhkan untuk melakukan percepatan pembangunan daerah mencakup pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan elemen CS. Dalam konteks desentralisasi ekonomi, setiap daerah dituntut untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi sehingga mampu mengembangkan ekonomi daerahnya dan memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha, terutama bagi pelaku usaha berskala mikro kecil dan menengah. Proses kreativitas dan inovasi tinggi yang apabila terus dipacu melalui kerjasama elemen CS pada akhirnya akan memunculkan komoditas unggulan berbasis sumber daya ekonomi lokal yang mampu bersaing di pasar domestik maupun ekspor. Pada akhirnya, diperlukan adanya penguatan pemahaman dan komitmen bersama seluruh stakeholders untuk membangun masyarakat.
- d. Dunia bisnis melakukan relokasi ulang aktivitas bisnis dengan perbaikan rantai nilai dan kluster industri. Persebaran atau distribusi aktivitas dunia usaha yang hanya terpusat di

wilayah tertentu perlu dipecah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, selain juga untuk menggerakkan aktivitas usaha masyarakat secara tersebar. Keunggulan masing-masing daerah dapat didekatkan sebagai sebuah kluster industri sebagai pendukung daya saing bangsa. Tentu hal ini perlu didukung dengan berbagai infrastruktur yang relevan.

- e. Organisasi masyarakat memfasilitasi perubahan budaya dan nilai-nilai kebersamaan di masyarakat dengan berbagai sosialisasi dan deseminasi. Dengan hal ini diharapkan akan adanya kesadaran baru dalam bermasyarakat, termasuk menghilangkan diskriminasi dan juga pemberian kesempatan yang setara pada wanita terhadap pendidikan, layanan sosial dan kesehatan, untuk memperbaiki peran bersama dalam pengendalian aset-aset ekonomi dan untuk mempertinggi partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Strategi II: Mengembangkan kesepahaman peran dan tanggung jawab antara CSO, pemerintah, dan pelaku bisnis

- a. Elemen CS bersama-sama mengevaluasi dan mengembangkan pola komunikasi bersama. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya. Komunikasi yang baik akan dapat meningkatkan

partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa yang merupakan awal yang baik untuk terciptanya masyarakat madani. Hal ini dimungkinkan karena otonomi individu terjaga. Penempatan cara-cara komunikasi antar elemen CS sebagai instrumentasi sosialnya menjadikan masyarakat pada umumnya memiliki daya yang berarti untuk memulai sebuah perubahan, dan ada tempat yang cukup luang untuk mengekspresikan partisipasinya dalam proses perubahan.

- b. Pemerintah memfasilitasi penyediaan sistem informasi bersama untuk meningkatkan akuntabilitas pertumbuhan CS. Komunikasi efektif saat ini sangat didukung oleh ketersediaan ICT sebagai infrastruktur komunikasi masyarakat madani. Adanya sistem informasi ini dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*). Sehingga akses informasi dan berbagai praktek baik dapat dilakukan dengan ketersediaan sistem informasi yang menunjukkan aktivitas dan capaian semua elemen masyarakat madani. Dengan demikian akan muncul sinergi untuk pencapaian tujuan bersama.
- c. Elemen CS mendefinisikan tujuan bersama dalam masyarakat dan menjabarkan dalam rencana aksi bersama yang berkelanjutan. Demi terbangunnya sebuah masyarakat madani yang demokratis, semua elemen harus berani menomorduakan identifikasinya pada institusi primordial

dan mengidentifikasinya hanya pada kepentingan bersama tanpa melihat ikatan primordial. Sehingga tidak mendiskriminasikan warga masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, politik, dan agama. Selain itu tidak ada diskriminasi dalam pemberian kesempatan untuk bekerja, memperoleh pendidikan. Kegairahan anggota masyarakat di dalam kegiatan pembangunan yang konstruktif ditentukan oleh sejauh mana mereka diajak berpartisipasi sebagai mitra, sejak perencanaan pembangunan sampai pada pelaksanaan serta evaluasi hasilnya. Hal ini dilakukan ketika tujuan-tujuan pembangunan dilakukan secara bersama dan sinergis antar dengan memperhatikan kepentingan ketiga elemen masyarakat madani. Kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah ini adalah salah satu ciri dari masyarakat madani.

- d. Elemen CS meningkatkan kesadaran para stakeholder masing-masing tentang pentingnya peningkatan kualitas masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antara masyarakat madani dan stakeholder terutama *political society*, harus dibangun atas dasar *simbiosis mutualisme* dan satu sama lain saling memperkuat bukan menegaskan. Hal ini tentu diperlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan hubungan semacam ini, karena situasi ini membutuhkan terjadinya kesinambungan antara negara dan

rakyat. Proses pengembangan masyarakat madani akan tergantung kesuksesannya kepada sejauh mana format politik pada semua stakeholder masyarakat madani dibuat.

Strategi III: Meningkatkan kesadaran hukum dan penghargaan pada keadilan

- a. Pemerintah melalui aparat penegak hukum meningkatkan komitmen pada penegakan hukum di berbagai sektor. Termasuk dalam upaya ini adalah melakukan reuiu atas produk-produk hukum tentang kriminal dan dorongan pada peluang kebebasan beropini, berekspresi, dan pemerolehan informasi. Iklim persaingan usaha secara sehat harus dapat dipertahankan dengan menjunjung tinggi moral, etika, kejujuran, keadilan dan penghargaan atas karya orang lain. Semua ini bertujuan untuk dapat menghasilkan tingkat dedikasi, apresiasi dan prestasi yang tinggi dari setiap orang; mengingat perubahan yang sangat cepat di bidang teknologi, moneter, industri, dan kegiatan bisnis/ usaha sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang betul-betul andal untuk mampu bersaing pada segenap aspek kehidupan.
- b. Elemen CS meningkatkan transparansi mekanisme dan sistem yang dimiliki dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi yang lebih baik akan ada kapasitas untuk mengidentifikasi berbagai kasus

bersama. Dan juga sistem keadilan secara nasional perlu dikembangkan dalam perbaikan transparansi yang sesuai dengan hukum-hukum nasional dan internasional.

- c. Elemen CS mengembangkan pola penghargaan (*reward*) bagi anggota masyarakat yang memiliki kontribusi bagi penegakan hukum dan keadilan. Termasuk dalam upaya ini adalah peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pembudayaan iptek, antara lain melalui pengembangan *techno-education*; *techno-exhibition*; *techno-entertainment*; dan *techno-preneurship* serta pengembangan inovasi dan kreativitas iptek masyarakat. Dan juga pengembangan dan pemanfaatan iptek berbasis kearifan tradisional (*traditional knowledge*) serta sumberdaya lokal.
- d. Dunia bisnis melalui CSR (*corporate social responsibility*) bersama organisasi masyarakat melakukan sosialisasi berbagai peraturan dan perundangan terkait nilai-nilai dan aturan-aturan tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat. Termasuk dalam hal ini tentang penggunaan hak cipta. Barang-barang yang diproduksi palsu dan dijual ke pasar, selain merugikan bagi penerimaan royalti para pencipta juga mengurangi pendapatan pajak negara dan penurunan kualitas barang yang dapat dinikmati oleh masyarakat konsumen. Kerugian ini jelas harus ditanggulangi dengan melakukan penegakan hukum atas

pelanggaran hak cipta tersebut sehingga dapat tercipta perlindungan yang diharapkan oleh semua pihak, terutama para pencipta/ pemegang izin. Daya kreatif dan inovatif para pencipta akan mengalami penurunan, jika pelanggaran hak cipta terus berlangsung tanpa ada penegakan hukum yang memadai dengan menindak para pelakunya. Negara melalui aparat penegak hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung harus bertanggung jawab dengan adanya peristiwa ini dengan berupaya keras melakukan penanggulangan merebaknya pelanggaran hak cipta. Ketaatan dalam penggunaan hak cipta akan mempengaruhi bangunan CS secara keseluruhan.

Strategi IV: Mengembangkan dan menegakkan moral dan etika profesi

- a. Elemen CS mendukung institusi penegak HAM untuk penerapan secara nasional nilai-nilai demokrasi dan integrasinya dalam berbagai kebijakan nasional. Pelanggaran HAM dan juga hak cipta akan membawa dampak buruk bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai atas hak cipta seseorang, maka daya inovasi dan kreativitas pencipta akan menurun tajam yang dapat merugikan semua pihak.
- b. Elemen CS bersama-sama mengintegrasikan HAM dalam pengembangan aktivitas yang fokus pada ekonomi, sosial,

dan budaya yang baik pada tiap anggota masyarakat. Termasuk dalam penegakan hukum adalah peningkatan sistem manajemen iptek terpadu, termasuk penyempurnaan peraturan yang mendukung komersialisasi hasil litbang, pengelolaan hak atas kekayaan intelektual (HKI), standar mutu, keamanan produksi, dan lingkungan; dan penyempurnaan sistem insentif dan pola pembiayaan iptek; serta peningkatan keterlibatan organisasi profesi ilmiah, perguruan tinggi serta masyarakat di semua elemen CS dalam memperkuat landasan etika dalam perumusan kebijakan iptek.

- c. Organisasi profesi di ketiga elemen CS menguatkan penerapan prinsip-prinsip demokrasi melalui reformasi dan menumbuhkan kesadaran warganegara dengan memberikan perhatian pada kelompok minoritas dan penduduk pedalaman.
- d. Pemerintah melakukan reformasi legislatif dan penguatan hukum domestik untuk mendorong nondiskriminasi dan memastikan kesesuaiannya dengan standar internasional. Diharapkan dengan hal ini akan mendorong pula pada pengembangan dan implementasi program-program yang mendukung kemajemukan institusi, dan proses demokatisasi lain yang selaras dengan HAM secara internasional.

Strategi V: Meningkatkan komitmen akuntabilitas elemen CS

- a. Pemerintah mengembangkan database management sistem (DBMS) untuk pengelolaan akuntabilitas semua elemen CS. Dengan upaya ini akan dapat ditingkatkan kapasitas semua elemen CS terutama pada organisasi non pemerintah pendukung berjalannya CS. Penguatan dilakukan melalui asistensi pengembangan kapasitas, dan secara berkelanjutan mendorong dialog dan kerjasama antar institusi kunci dalam penerapan CS sehingga semua elemen dapat lebih efektif dalam pengembangan dan penerapan regulasi. Selain itu, semua elemen perlu memanfaatkan DBMS untuk mengintegrasikan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program yang terintegrasi agar target dapat dicapai dengan lebih efektif.
- b. Elemen CS secara reguler menyelenggarakan pengukuran ataupun auditing pelaksanaan aktivitas terkait pengembangan CS di tiap elemen. Pengukuran kinerja, monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan baik dan dengan memanfaatkan *good practice* akan memungkinkan terjadinya pertukaran data yang optimum, kontribusi informasi dan pengetahuan terhadap pemajuan IPTEK. Melalui aktivitas ini akan tumbuh mekanisme saling tukar data, informasi, dan pengetahuan yang lebih baik dalam

peningkatan inovasi dan riset. Selain itu juga dimungkinkan untuk akses terbuka dalam data yang mendorong pada kemajuan IPTEK. Akses terbuka juga akan meningkatkan nilai data yang dikelola oleh elemen CS.

- c. Elemen CS mengembangkan ketersediaan SDM untuk pengelolaan sistem informasi pelaksanaan aktivitas penerapan CS. Dengan dukungan SDM yang baik dapat dipastikan bahwa IT terdukung sumberdaya yang cukup dan dapat dikembangkan untuk mendukung berjalannya tujuan dalam penerapan masyarakat madani. Selain itu juga akan tersedia sistem pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang dapat digunakan oleh semua elemen CS sehingga akan diperoleh pula kebijakan dan prosedur dalam modernisasi sumber daya yang ada di masyarakat.
- d. Pelaku bisnis memfokuskan pemanfaatan CSR untuk peningkatan dan pengembangan infrastruktur ICT pendukung penerapan CS. Dengan aktivitas ini dukungan pada masyarakat dan institusi dalam penggunaan berbagai sumber dan media untuk memperoleh layanan pengetahuan dan budaya secara lebih luas. Dengan demikian akan terjadi pembentukan pemahaman dan kesadaran bersama tentang nilai-nilai yang perlu dipegang melalui sebuah proses dialog berkelanjutan. Selain itu juga memungkinkan pemanfaatan ICT untuk peningkatan kemampuan industri kecil menengah

dan koperasi yang berbasis teknologi melalui pemanfaatan jaringan sistem informasi teknologi dan asistensi teknis, pelatihan kerja, mendorong kemitraannya dengan industri besar, dan mengembangkan berbagai sistem insentif.

Strategi VI: Menumbuhkan sinergi dan intermediasi pemajuan IPTEK antar lembaga dalam CS

- a. Pemerintah mempercepat proses adopsi, adaptasi, dan penciptaan standar internasional berkelanjutan untuk mendorong daya saing bisnis dalam kerangka kolaborasi elemen CS. Reviu ataupun kajian hubungan antara elemen CS dalam pendorong daya saing akan membawa keuntungan pada semuanya dan pembentukan cara baru dalam kerjasama masing-masing elemen CS untuk mendukung tujuan nasional. Upaya ini juga perlu didukung dengan peningkatan partisipasi pemerintah daerah dan pengembangan pola kemitraan iptek antara pusat dan daerah, serta antar daerah; selain juga pengembangan prasarana untuk mendukung penerapan standar dan penilaian kesesuaian atas mutu produk pelaku usaha.
- b. Organisasi masyarakat (CSO) mengembangkan mekanisme kontribusi bagi penelitian, peningkatan kesadaran konsumen, media independen untuk memperhatikan pentingnya pembangunan berkelanjutan melalui jaringan pembelajaran

di masyarakat. Perubahan peran menjadi lebih jelas ini akan dapat mempengaruhi mekanisme dan kinerja institusi penelitian selain melalui *partnership* akan memperbaiki efektivitas dan efisiensi kebijakan IPTEK.

- c. Pemerintah membuat agenda yang mendorong pelaku bisnis untuk berkinerja tinggi melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan. Dengan hal ini akan hilang hambatan ekonomi dalam birokrasi karena adanya kesadaran bersama untuk distribusi sumber daya dan peluang, dorongan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, akses yang lebih baik pada informasi untuk pembangunan ekonomi, termasuk juga *technical assistance* untuk menguatkan instrumen dan institusi pengaturan (*regulatory instruments and institutions*).
- d. Pelaku bisnis menyediakan berbagai upaya mendekatkan hasil penelitian dengan produksi dan pemasaran produk/ jasa berbasis IPTEK. Penguatan evaluasi organisasi riset publik, dukungan program, dan kebijakan IPTEK akan memungkinkan identifikasi dan penularan pendekatan praktek baik (*good practice approaches*) yang mampu menumbuhkan kualitas hasil riset. Orientasi hasil ini adalah pada penguatannya di aspek sosial dan ekonomi. Dalam usaha untuk mendekatkan hasil penelitian dengan pengguna perlu memperhatikan peningkatan partisipasi masyarakat

dalam pengkajian IPTEK yang terlihat pada karir dan pendidikan yang relevan dengan IPTEK. Mobilitas SDM bidang IPTEK akan berimplikasi pada kebijakan.

- e. Organisasi masyarakat berperan serta dalam penyediaan peluang-peluang baru untuk mendorong penyebaran pengetahuan, edukasi konsumen, dan penyediaan asuransi dan sertifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai program asistensi dan pengembangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat keseluruhan, dan lebih efektif dalam mendorong perbaikan kualitas masyarakat secara lokal. Termasuk dalam upaya ini adalah bagaimana dilakukan penguatan peran kolaborasi internasional dalam IPTEK untuk peningkatan kualitas masyarakat. Termasuk dalam upaya ini adalah pengembangan sistem komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan antar kelembagaan iptek (lembaga litbang, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga pendukung di masyarakat) baik di dalam maupun luar negeri.

BAB VII

PENUTUP

1. Kesimpulan

Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Masyarakat Madani (Civil Society) dan Pluralitas Agama Di Indonesia*, <http://islamkuno.com/2008/01/16/masyarakat-madani-civil-society-dan-pluralitas-agama-di-indonesia/>
- _____, (2004) *What is civil society?*, http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/what_is_civil_society.htm
- _____, (2006) *Science, Innovation, Technology and the African Society: Implications for Achieving MDGs*, Report of the 2006 ATPS/MCTM Annual Conference and Workshop held on 27 - 29 November 2006, Maputo, Mozambique
- _____, (2008) *Bribe Payers Index 2008*, Transparency International, www.transparency.org
- _____, (2008) *ADB Cooperation with Civil Society: Annual Report 2008*, Asian Development Bank (ADB)
- _____, (2009) *Transparency in Reporting on Anti-Corruption – A Report of Corporate Practices*, Transparency International
- AccountAbility (2009) *Responsible Competitiveness In China 2009: Seizing the low carbon opportunity for green development*, www.responsiblecompetitiveness.org
- Amoako, K. Y. (2001) *OAU-Civil society Conference: Opening*

- Statement*, Addis Ababa, 11 June 2001, http://www.uneca.org/eca_resources/speeches/amoako/2001-/061101speech_oau_civil_society_conference.htm
- Anheier, H. & Stares, S. (2002) *Introducing The Global Civil society Index*, www.lse.ac.uk/-Depts/global/Publications/.../2002chapter910.pdf
- Anheier, H., Katz, H., & Lam, M. (2008) *Diffusion Models And Global Civil Society*, London: Sage
- Asian Development Bank, (2009) *Asian Development Outlook 2009: Rebalancing Asia's growth*, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank
- Bahmueller, CF (1997), *The Role of Civil society in the Promotion and Maintenance of Constitutional Liberal Democracy*, <http://civnet.org/civitas/panam/papers/bahm.htm>.
- Balogun, J. (2010) *Agency Governance Indicators*, African Training and Research Centre in Administration for Development
- BAPPENAS, (2009) *Buku Pegangan 2009: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*
- Bissio, R. (2003) Civil society And The MDGs, *the UNDP Development Policy Journal*, Volume 3, April 2003
- Brown, M.M. (2007) *Sources for Democratic Governance Indicators*, United Nations Development Programme
- Civicus, (2010) *Indicators of threats to civil society*, www.civicus.org/csw/csw.../indicators-of-threats-to-civil-

society

- Dobson, R., et.al. (2009) *The 2009 Global Corruption Barometer*, Transparency International.
- Faturochman, (1990) Kualitas Manusia: Sumber Utama Pembangunan, *Yogya Post*, 7 Agustus 1990
- Gabriel, N. (2003) The Millennium Development Goals: Towards a Civil society Perspective on Reframing Poverty Reduction Strategies in Southern Africa, *the Southern Africa MDGs Forum*, Johannesburg, 2 – 4 July 2003
- Giddens, A. (2000), *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Griadhi, N. M. A. Y. & Sri Utari, A.A. (2008) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Kertha Patrika vol. 33 no. 1*, Januari 2008
- Hasibuan, A. (2010) *Reformasi Hukum Belum Terarah*, <http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=12138>
- Heimann, Fritz dan Dell, Gillian (2009) *Progress Report 2009: Enforcement of the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*, www.transparency.org
- Holloway, R. (2007) *Corruption and Civil society Organisations in Indonesia*, <http://www.10iacc.org/download/workshops/cs30a.pdf>

- Hyden, G., Court, J., & Mease, G (2003) *Civil society And Governance In 16 Developing Countries*, World Governance Survey Discussion Paper 4, Overseas Development Institute
- Kaldor, M. (2003) Civil society and Accountability, *Journal of Human Development*, Vol. 4, No. 1, 2003
- Kittilson, M. C., Dalton, R. J. (2008) *The Internet and Virtual Civil Society: The New Frontier of Social Capital*, Center for the Study of Democracy, UC Irvine, <http://escholarship.org/uc/item/2cj1c67k>
- Kleden, I. (2000), “Epistemologi Kekerasan di Indonesia”, dalam *Indonesia di Persimpangan Kekuasaan: Dominasi Kekerasan atas Dialog Publik*, Jakarta: The Go-East Institute, hal.1-7.
- Klugman, J. (2009) *Human Development Report 2009, Overcoming barriers: Human mobility and development*, United Nations Development Programme, New York
- Korten, D.C., Perlas, N., & Shiva, V. (2002) *Global Civil Society: The Path Ahead*, www.pcdf.org/civilsociety/default.htm
- Lee, H., MacGillivray, A., Begley, P., Zayakova, E. (2010) *The Climate Competitiveness Index 2010*, AccountAbility
- Lunat, Z. (2008) *The Internet And The Public Sphere: Evidence From Civil society In Developing Countries*, The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries EJISDC (2008) 35, 3, 1-12

- Mati, J.M., Silva, F. & Anderson, T. (2010) *Assessing and Strengthening Civil society Worldwide: An updated programme description of the CIVICUS Civil society Index: Phase 2008 to 2010*, CIVICUS
- Munandar , A. (2002) *Pembangunan Nasional, Keadilan Sosial, Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Universitas Paramadina Vol.2 No. 1, September 2002: 12-24
- Naidoo, K. (2010) *The End of Blind Faith? Civil society and the Challenge of Accountability, Legitimacy and Transparency*, Accountability Forum
- Nurdin, D. (2008) Reformasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani, *Harian Pikiran Rakyat*, Minggu 23 Nopember 2008
- Schwab, K. & Sala-i-Martin, X. (2009) *The Global Competitiveness Report 2009-2010*, World Economic Forum
- Soesastro, H. (2001) *Civil society in Indonesia: The role of the civil society in the democratization process in Indonesia*, New York, Asian Social Issue Program and Synergos Institute, http://www.csis.or.id/feature_view.asp?tab=0&id=49
- Sonko, B. (2005) *Civil society Contribution Towards Achieving The MDGs In The Gambia*, [http:// www.gm.undp.org/ Reports/ Civil%20society%20contn%20to%20the%20MDGs%20in%20The%20Gambiapdf.pdf](http://www.gm.undp.org/Reports/Civil%20society%20contn%20to%20the%20MDGs%20in%20The%20Gambiapdf.pdf)
- Sudarmo, S.P. & Sudjana, B.G. (2009) *The Missing Link: The Province and Its Role in Indonesia's Decentralization*,

UNDP-Indonesia

- Sufyanto (2001) *Masyarakat Tamaddun: Kritik hermeneutis Masyarakat madani Nurcholish Madjid*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar
- Suharto, E., (2010) *Masyarakat Madani: Aktualisasi Profesionalisme Community Workers Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan*, [Http:// Www.Policy.Hu/Suharto/Modul_A/-Makindo_16.Htm](http://www.Policy.Hu/Suharto/Modul_A/-Makindo_16.Htm)
- Sujatmiko, I.G. (2001) Wacana Civil society di Indonesia, *Jurnal Sosiologi* edisi No.9, 2001, Jakarta, Penerbit Buku Kompas
- Sulaswatty, A. (2008) *Masyarakat Acuh Hukum*, Suara Merdeka, 23 Juli 2008
- Suryadi, A. (2007) *Masyarakat Madani di Indonesia: Studi Kasus Petisi 50*, <http://www.digilib.ui.ac.id/-opac/themes/libri2/detail.jsp?id=75964>
- Suyatno (2009) *Pangan dan gizi Sebagai indikator Kemiskinan*, FKM Undip Semarang, <http://suyatno.blog.undip.ac.id/files/2009/11/13-indikator-kemiskinan.pdf>
- Transparency International (2009) *Business Principles for CounterinG Bribery – A multi-stakeholder initiative led by Transparency International*
- Trisnawati, R., Wiyadi, & Priyono, E. (Analisis Daya Saing Industri Pariwisata Untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah, *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara*

Berkembang, Hal: 61 – 70

- United Nation. (2010) World e-government Rankings, *United Nations E-Government Survey 2010*
- UN, (2001) *Road map towards the implementation of the United Nations Millennium Declaration*, Report of the Secretary-General A/56/326, 6 September 2001
- Vetter, T., Andjelkovic, M., Creech, H. (2009) *Governance of Technology and Society: Progress on Internet Governance*, International Institute for Sustainable Development (IISD)
- Vogt, G. (2006) *Facing the Challenge of Immigration? The State, Civil society and Structures of Interdependence*, German Institute for Japanese Studies, Tokyo
- World Bank (2005) *Improving World Bank - Civil society Engagement*, Last updated: August 8, 2005, <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,content MDK: 20093200~menuPK: 220424~pagePK: 220503~piPK: 220476~theSitePK:228717,00.html>

GLOSSARY

Agama: Keyakinan dalam berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan alam semesta.

Akuntabilitas: Dapat dipercaya dan dapat ditelusuri kebenarannya.

ASEAN: organisasi negara-negara di wilayah Asia Tenggara.

Civil Society: Masyarakat madani, suatu keadaan masyarakat yang dapat mengelola diri sendiri untuk mencapai kebaikan bersama.

Dasar Negara: Landasan suatu negara dalam mencapai cita-cita dan mengatur kehidupannya.

Daya Saing: Kemampuan untuk dapat dibandingkan dengan yang lain dan dapat bertahan

Demokrasi: (Bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dng perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

Diskriminasi: Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb.

Efektivitas: Kemampuan untuk mencapai tujuan dengan cara yang optimal.

Efisien: Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dengan masukan

yang sesedikit mungkin.

Falsafah: Anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat; pandangan hidup.

Globalisasi: Proses masuknya suatu aktivitas pada lingkup dunia.

Ideologi: Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup: di pertemuan itu penatar menjelaskan dasar Negara.

Ilmu Pengetahuan: Gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dng memperhitungkan sebab dan akibat.

Indikator: Ukuran yang dapat dilihat sebagai suatu tanda pada fenomena

integritas: mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran jati diri: ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda; identitas; (2) inti, jiwa, semangat, dan daya gerak dr dalam; spiritualitas.

Kebijakan: Keputusan untuk kemungkinan dilakukannya perbaikan

Kejahatan Keras Putih: Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi startegi dan berpedidikan tinggi.

Kendala: Hambatan untuk mencapai tujuan

Kesadaran Hukum: Motivasi individu atau sekelompok orang untuk

mentaati peraturan dan norma yang ada dalam masyarakat

Kesejahteraan: Keadaan dimana seseorang merasa tercukupi semua kebutuhannya.

Kompetensi: Kemampuan khusus yang membedakan dengan yang lain.

Korupsi: Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Persatuan: Gabungan (ikatan, kumpulan, dsb) beberapa bagian yang sudah bersatu.

Teknologi: Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan; keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

INDEKS

- Agama, 3, 13, 15, 20, 47, 64,
72, 76, 96, 105
- Akuntabilitas, 33, 43, 46, 50,
52, 55, 74, 75, 79, 84, 88,
91, 96, 100
- Asean, 44
- Bank Dunia, 8
- Berbangsa, 11, 12, 14, 28, 72
- Berkumpul, 42, 71
- Bermasyarakat, 11, 12, 14, 16,
57, 72, 73, 95
- Bernegara, 1, 11, 12, 14, 16,
28, 72
- Civicus, 6, 22, 107
- Civil Society, 1, 2, 4, 5, 6, 8,
11, 12, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 28, 30, 31, 32, 35,
36, 38, 42, 43, 44, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 69,
71, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
105, 106, 107
- Dasar Negara, 11
- Daya Saing, Vi, 3, 5, 29, 31,
49, 51, 61, 62, 64, 67, 78,
80, 95, 101
- Demokrasi, 2, 3, 19, 21, 24, 33,
41, 42, 44, 52, 55, 67, 71,
72, 84, 86, 92, 99
- Diskriminasi, 43, 49, 72
- Efektif, 18, 32, 33, 89, 94, 100,
102
- Efektivitas, 23, 32, 34, 75, 102
- Efisien, 18
- Efisiensi Pasar, 48
- Falsafah, 11, 15, 16
- Globalisasi, 4, 51, 57, 80
- Good Governance*, 46, 52, 74
- Ideologi, 11, 56, 57, 60, 61, 64,
67
- Ilmu Pengetahuan, 9, 13, 31,
50, 51, 53, 77, 79, 80, 99

Indikator, 7, 11, 30, 35, 36, 42,
46, 48, 65, 69, 71, 80, 81,
82, 83, 93, 107

Integritas, 10, 12, 23

Iptek, I, Iii, Iv, Vi, 3, 4, 5, 31,
35, 47, 48, 49, 50, 52, 55,
56, 62, 67, 69, 70, 71, 72,
77, 78, 79, 80, 81, 85, 88,
89, 90, 91, 93, 100, 101, 102

Jati Diri, 16, 67

Keamanan Nasional, 38, 41, 66

Kebijakan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18,
26, 31, 33, 35, 36, 41, 43,
44, 45, 50, 55, 56, 57, 59,
61, 66, 67, 69, 71, 73, 74,
79, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 99, 101, 102

Kejahatan, 12, 45, 50, 52, 79

Kejahatan Terutama Kejahatan
Kerah Putih, 45, 52

Kekuatan Hukum, 11

Kendala, 7, 34, 45, 56, 66, 67,
90, 91

Kepercayaan, 3, 13, 19, 26, 27,
60, 73, 76, 84, 95

Keputusan, 41, 45, 49, 50, 52,
55, 70, 73, 74, 78, 79, 84,
88, 90, 95

Kesadaran Hukum, 45, 54, 76,
77, 82, 83, 91, 97

Kesejahteraan, 1, 3, 4, 12, 13,
15, 24, 28, 51, 68, 80, 88

Ketahanan Nasional, 1, 4, 5,
10, 11, 25, 26, 28, 29, 31,
35, 51, 52, 69, 72, 80, 89,
90, 91, 93

Ketertiban Dunia, 12

Kompetensi, 23, 75

Kondisi Dinamik, 9, 10

Konflik Komunal, 3, 52

Korupsi, 38, 46, 50, 52, 54, 76,
79, 84

Masyarakat Madani, 1, 2, 3, 4,
8, 12, 19, 20, 21, 24, 26, 27,
28, 31, 42, 43, 55, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 77, 81,

82, 84, 86, 87, 89, 90, 92,
96, 97, 100

Masyarakat Sipil, 2, 25, 90, 92

Mdgs, 4, 5, 30, 32, 33, 58, 80,
105, 106, 107

Monitoring, 45, 74, 84, 100

Ngo, 32, 42, 71

Non Formal, 22, 49, 79

Pancasila, V, 11, 15, 16, 27, 28,
30, 57, 64, 70

Pemerintah Daerah, 3, 94, 101

Penegakan Hukum, 44, 72

Penindasan, 3

Pertahanan Negara, 17

Pola Pikir, 10, 30, 92

Pola Sikap, 10, 30

Pola Tindak, 10, 30, 92

Politik, 3, 14, 19, 20, 23, 24,
32, 33, 41, 42, 44, 45, 50,
52, 54, 55, 56, 59, 61, 64,
67, 71, 72, 73, 74, 79, 83,
84, 92, 94, 96, 97

Ras, 3, 19, 73

Reformasi, 18, 21, 45, 58, 59,
99

Rekayasa, 9, 96

Strategi, 4, 5, 6, 7, 17, 31, 32,
35, 54, 55, 56, 66, 69, 82,
88, 89, 91, 92

Sumber Daya Alam, 3, 63, 75

Teknologi, 3, 9, 13, 16, 17, 31,
35, 48, 50, 51, 53, 55, 56,
61, 77, 79, 80, 85, 97, 99,
101

Transparansi, 3, 59, 82, 97

Unggul, 3, 4, 28

Upaya, 5, 6, 7, 10, 12, 21, 31,
35, 56, 58, 59, 60, 64, 69,
88, 89, 90, 93, 94, 97, 98,
100, 102

Wawasan Nusantara, 1, 11, 27



PENINGKATAN CIVIL SOCIETY

UNTUK KEMAJUAN IPTEK DAN KETAHANAN NASIONAL

Pembahasan tentang masyarakat madani sesungguhnya menjadi bagian penting dalam penerapan konsepsi wawasan nusantara. Dalam proses sosialisasi konsepsi wawasan nusantara akan mencakup pembahasan tentang 5 hal: (1) Kesadaran, Paham, dan Semangat Kebangsaan, (2) Cinta dan Pembelaan Tanah Air, (3) Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Warga Negara, (4) Kehidupan Multikultural dan Plural, dan (5) Masyarakat Madani (Civil Society). Sehingga pembahasan tentang penguatan *civil society* akan mendukung penerapan konsepsi wawasan nusantara dengan lebih baik.

Dalam wawasan nusantara, kehidupan bernegara akan terjamin dalam mencapai tujuan bersama bila ada kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan. Keberadaan masyarakat madani atau *civil society* diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang kekuatan negara dalam hal ini pemerintah. Masyarakat madani yang bermoral, sadar hukum, dan beradab; mampu mewakili masyarakat umum atau rakyat dalam memperjuangkan kepentingan bersama kepada pemerintahan. Di samping itu, masyarakat madani akan mampu mendorong pemerintahan untuk pengembangan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat umum. Sebaliknya, masyarakat madani akan mendukung pemerintahan yang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Dengan demikian, akan dapat ditegakkan sistem kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan rakyat banyak sehingga kehidupan bersama yang harmonis dan dinamis dapat diciptakan.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat!!



Cetta Media

Penerbit **Cetta Media**
(KELOMPOK PENERBIT MARKUMI)
Minggiran MJ II/ 1323 RT.64/17 Yogyakarta
Telp./ Fax. (0274) 6874768/ 413860
Email. penerbitmarkumi@yahoo.com
Web. www.markumi.com

ISBN : 978-602-97513-4-5



9 786029 751345